



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL : 5 TAHUN 2007

TENTANG

**KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI POLRI
KURIKULUM PENDIDIKAN SESPIM POLRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dapat diperoleh melalui sistem pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terprogram, terarah, sistematis dan berlanjut berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kapolri serta piranti lunak atau buku pedoman yang baku;
 - b. bahwa Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur pelaksana pendidikan pengembangan manajemen pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang manajemen keamanan tingkat menengah dan tingkat puncak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 88 /XI / 2003, tanggal 5 November 2003 tentang Filosofi Pendidikan Polri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI POLRI - KURIKULUM PENDIDIKAN SESPIM POLRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Pendidikan Polri adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan untuk membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Peserta Didik menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, misi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Polri.
4. Peserta Didik adalah merupakan Perwira Menengah Polri dan Aparat Penegak Hukum lainnya yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon Peserta Didik pada Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan pengembangan Polri

5. Pembelajaran adalah interaksi Peserta Didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik
6. Bahan Ajar yang selanjutnya disebut Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum sesuai jenis dan jenjang pendidikan.
7. Evaluasi Pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Sespati Polri dan kurikulum pendidikan Sespim Polri yaitu harus:

- a. sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
- b. sesuai dengan tuntutan kemajuan dan tantangan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan pengembangan organisasi Polri sendiri;
- c. efisien dan efektif;
- d. terbuka;
- e. menekankan pada pengembangan kemampuan profesional sesuai dengan kompetensi Pendidikan di bidang Kepolisian.

Pasal 3

Tujuan diadakannya kurikulum adalah:

- a. tujuan Institusional yaitu menghasilkan Peserta Didik calon pimpinan Polri yang memiliki kualifikasi pimpinan dan staf yang profesional di bidang Kepolisian dan memiliki kemampuan berfikir secara strategis, berinisiatif dan kreatif, untuk menentukan cara bertindak yang dinamis, dalam menghadapi tantangan perkembangan tugas-tugas Polri, sehingga mampu mengaplikasikan seluruh kebijaksanaan Pimpinan Polri;
- b. tujuan Kurikuler yaitu menghasilkan Peserta Didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari setiap bidang studi, guna mewujudkan keutuhan kemampuan profesionalisme Polri, setelah menyelesaikan keseluruhan program pendidikan;
- c. tujuan Instruksional yaitu menghasilkan Peserta Didik memiliki/menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap selaku penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan pemelihara keamanan dalam negeri, serta mampu menerapkan/mengamalkan dan mengembangkannya dalam berbagai bidang penugasannya.

BAB II**KURIKULUM****Pasal 4**

- (1) Pengembangan kurikulum harus mengacu pada filosofi, visi dan misi, serta tujuan pendidikan Sespim Polri.
- (2) Kurikulum disusun berbasis kemampuan atau kompetensi dan dijabarkan dalam bidang studi dan mata pelajaran yang diberikan.
- (3) Struktur kurikulum disusun menurut bidang studi yang dijabarkan ke dalam mata pelajaran dan program kegiatan khusus secara proporsional yang berjalan selama waktu kalender pendidikan yang ditentukan melalui tahapan-tahapan pendidikan.
- (4) Ketentuan visi, misi, tujuan pendidikan, kemampuan atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) dijabarkan dalam lampiran kurikulum pendidikan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Materi kurikulum disusun sesuai besaran pentahapan pendidikan, yang terdiri dari:
 - a. pembekalan akademis, merupakan kegiatan belajar individu, sindikat dan kelas di dalam kampus untuk mengkaji berbagai konsep strategis dalam rangka memperdalam pola pikir dan perluasan wawasan;
 - b. penelitian atau Peninjauan Lapangan, merupakan kegiatan bagi Peserta Didik di lapangan guna menguji dan menganalisis penerapan konsep strategis yang diperoleh dan dikaji selama berada di kampus;
 - c. pembulatan merupakan kegiatan untuk melaksanakan latihan olah taktis dan olah strategi, Seminar/workshop/sarasehan dan penyempurnaan laporan perorangan, kelompok/sindikat maupun kelas angkatan.
- (2) Program kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

BAGIAN KESATU
LAMA PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Lama program pendidikan didasarkan pada substansi materi kurikulum dengan ketentuan:
 - a satu jam pelajaran meliputi 40 menit, setiap sesudah 3 (tiga) Jam Pelajaran;
 - b satu unit pelajaran diadakan istirahat selama 15 (lima belas) menit.;
 - c jumlah jam Pelajaran setiap hari maksimum 12 (dua belas) Jam Pelajaran;
 - d pelajaran malam hari diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lama program pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAGIAN KEDUA
TEKNIK PEMBELAJARAN

Pasal 7

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

- a. kuliah monologis, dilaksanakan oleh Dosen dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para Peserta Didik.
- b. diskusi panel/tanya jawab, dilaksanakan dua arah antara Dosen dengan Peserta Didik dalam rangka memantapkan penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan permasalahan aktual yang berkembang dalam lingkup tugas-tugas Polri.
- c. pendalaman/tes pembahasan, dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi wawasan, kemampuan daya nalar dan ketajaman daya analisis dari para Peserta Didik terhadap materi pelajaran yang telah diberikan, agar terwujud peningkatan kualitas para Peserta Didik.

BAGIAN KETIGA METODE PENGAJARAN

Pasal 8

- (1) Metode pengajaran menggunakan metode yang berpusat kepada Peserta Didik untuk mampu berpikir, reflektif, serta bergairah dalam mencari atau melakukan penelitian dan studi, baik perorangan maupun kelompok demi pengembangan pribadinya kearah efektivitas dan efisiensi.
- (2) Perbandingan antara kuliah/ceramah dengan aplikasi, terutama bagi mata pelajaran Pokok adalah dengan bobot 30 banding 70 (30 : 70).
- (3) Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran meliputi:
 - a. metode kuliah, merupakan metode yang menuntut ditumbuhkannya otonomitas Peserta Didik untuk belajar sendiri;
 - b. metode ceramah, merupakan rangkaian pengajaran oleh Pengajar di dalam maupun di luar Lembaga dan juga oleh para pejabat Pemerintah dan Swasta yang bertujuan untuk memperluas pandangan Peserta Didik, terutama mengenali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku;
 - c. metode peragaan, merupakan penyajian melalui sarana khusus, sehingga mengurangi atau menggantikan penyampaian secara lisan oleh pengajar;
 - d. metode diskusi, merupakan kegiatan sekelompok Peserta Didik untuk membahas materi yang ditugaskan dari pengajar, penceramah dan lembaga dengan tujuan untuk melatih dalam mengutarakan, menerima dan menyangkronisasikan pendapat-pendapat, dengan aplikasinya dalam bentuk diskusi sindikat/kelas/panel/ceramah dan seminar/jumpa publik;
 - e. metode debat formal, merupakan latihan untuk memberikan argumentasi secara formal dengan cara mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan utama;
 - f. metode pengkajian kelompok, merupakan kegiatan oleh Peserta Didik guna mengkaji pokok permasalahan tertentu dengan didampingi oleh Staf pengajar atau peneliti;
 - g. metode studi kasus, merupakan pengkajian secara kritis dan analisis baik yang nyata maupun yang hipotetis sifatnya;
 - h. metode simulasi, merupakan kegiatan Peserta Didik untuk mengembangkan suatu model dari keadaan sesungguhnya yang akan dibahas;
 - i. metode survei, merupakan metode pengumpulan data dan informasi untuk digunakan dalam usaha mendukung atau membuktikan kebenaran dari suatu hal berdasarkan preposisi dan hipotesis;

- j. metode latihan, merupakan seluruh usaha untuk mengembangkan kemampuan yang meliputi mempertinggi keahaman dan kemahiran untuk mengerjakan sesuatu;
- k. metode geladi, merupakan seluruh usaha untuk memberikan kemampuan agar dapat melakukan sesuatu seperti yang direncanakan, selanjutnya dapat ditingkatkan untuk memberikan kemahiran;
- l. metode seminar, merupakan pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi/pembahasan serta pengkajian untuk mendapatkan suatu konsensus/kesepakatan bersama mengenai masalah tersebut;
- m. metode tugas baca atau bedah buku, merupakan kegiatan Peserta Didik untuk melaksanakan penugasan dalam membaca, mengkaji, meringkas serta merumuskan intisari bahan bacaan tersebut.;
- n. metode kertas karya, merupakan suatu penugasan untuk memberikan kemampuan mengemukakan pendapat secara sistematis logis dan konsepsional strategis dalam bentuk tulisan perorangan maupun kelompok;
- o. metode penyajian lisan, merupakan metode yang tidak hanya menekankan pada kemantikan penalaran, tetapi juga kejelasan pengungkapan pendapat secara lisan di dalam berbagai macam situasi baik sebagai staf maupun pimpinan.

BAGIAN KEEMPAT METODE PENYAJIAN PELAJARAN

Pasal 9

Metode penyajian pelajaran terdiri dari pemberian teori dan praktek

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, metode penyajian dibagi berdasarkan tingkat kemampuan :
 - a. mengetahui;
 - b. mengerti;
 - c. memahami; dan
 - d. menguasai.
- (2) Tingkat kemampuan mengetahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Peserta Didik menggunakan metode studi kepustakaan dan audio visual, sedangkan untuk Dosen, menggunakan metode ceramah dan audio visual.

/ (3) Tingkat

- (3) Tingkat kemampuan mengerti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Peserta Didik menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, sedangkan untuk Dosen menggunakan metode kuliah dan tanya jawab.
- (4) Tingkat kemampuan memahami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Peserta Didik menggunakan metode seminar dan diskusi, sedangkan untuk Dosen menggunakan tanya jawab.
- (5) Tingkat kemampuan menguasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Peserta Didik menggunakan metode aplikasi, kajian, geladi dan diskusi, sedangkan yang berpusat pada Dosen menggunakan metode penugasan dan diskusi.

Pasal 11

- (1) Dalam pemberian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, metode penyajian dibagi berdasarkan tingkat kemampuan:
 - a. dapat secara terbatas;
 - b. mampu; dan
 - c. mahir.
- (2) Tingkat kemampuan dapat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berpusat pada Peserta Didik, menggunakan metode *drill* dan demonstrasi, sedangkan yang berpusat pada Dosen menggunakan metode penugasan.
- (3) Tingkat kemampuan mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berpusat pada Peserta Didik menggunakan metode pemecahan masalah, sedangkan yang berpusat pada Dosen menggunakan metode penugasan.
- (4) Tingkat kemampuan mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berpusat pada Peserta Didik menggunakan metode pemecahan masalah, sedangkan yang berpusat pada Dosen menggunakan metode Penugasan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyajian pelajaran, dosen wajib menyiapkan naskah bahan ajaran dan artikel-artikel terpilih dengan metode penyajian teori dan praktek.
- (2) Setiap Peserta Didik harus aktif mempelajari naskah bahan ajaran, artikel-artikel terpilih dan referensi yang diperlukan sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan/penyajian teori maupun praktek.
- (3) Setiap widyaiswara sindikat harus aktif melaksanakan pembimbingan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan evaluasi secara obyektif terhadap progres kepemimpinan, akademik dan kesamaptaaan serta kesehatan Peserta Didik, dan melakukan koreksi untuk mencapai tahapan tujuan Pendidikan.

Pasal 13

Dalam proses pemahaman materi, setiap peserta didik harus:

- a mengikuti ceramah perkuliahan;
- b membuat resume;
- c menyusun naskah perorangan (brainstorming), meliputi pola pikir, pendapat, paparan naskah karya perorangan;
- d melaksanakan diskusi kelompok atau sindikat dan merumuskan naskah kelompok atau sindikat;
- e melaksanakan diskusi kelas sedang, dan paparan naskah kelompok atau sindikat;
- f melaksanakan diskusi kelas besar, dan merumuskan naskah karya kelas besar;
- g test atau ujian mata pelajaran.
- h. Bedah buku.

**BAGIAN KELIMA
KEWIDYAISWARAAN****Pasal 14**

- (1) Widya Iswara berkewajiban mengarahkan segala usaha dan kegiatan Peserta Didik dalam bidang akademi maupun kepemimpinan sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Proses Kewidyaiswaraan dilakukan secara individual ataupun kelompok baik dalam kegiatan kurikuler, non kurikuler dan ekstra kurikuler dengan memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengarahan kepada Peserta Didik dengan tujuan kemampuan secara mandiri.

**BAGIAN KEENAM
PENERAPAN METODE****Pasal 15**

- (1) Penerapan metode dalam proses pendidikan di Sespim Polri merupakan kombinasi antara beberapa metode yang disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai.

/ (2) Penyesuaian

- (2) Penyesuaian penerapan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. pokok/mutlak;
 - b. pendukung/penting;
 - c. pelengkap/faedah.
- (3) Mata pelajaran pokok/mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan dengan metode:
 - a. kuliah;
 - b. diskusi pendalaman;
 - c. diskusi pemecahan masalah dan atau ujian pendalaman/pembahasan;
 - d. aplikasi, antara lain kuliah kerja, penyusunan makalah, latihan lapangan/geladi, simulasi, dengan didukung oleh metode lainnya.
- (4) Bagi Peserta Didik yang karena suatu hal tidak mengikuti kegiatan mata pelajaran pokok/mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mendengarkan rekaman kuliah dan diskusi serta membuat resume dan diserahkan kepada Direktur Akademik.
- (5) Mata pelajaran pendukung/penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan dengan metode:
 - a. kuliah;
 - b. diskusi pendalaman;
 - c. diskusi pemecahan masalah atau ujian pendalaman/ pembahasan dengan didukung oleh metode lainnya.
- (6) Bagi Peserta Didik yang karena sesuatu hal tidak mengikuti kegiatan mata pelajaran penting sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban untuk mendengarkan rekaman kuliah dan diskusi serta membuat resume dan diserahkan kepada penanggung jawab bidang studi mata pelajaran yang terkait.
- (7) Mata pelajaran pelengkap/faedah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterapkan dengan metode:
 - a. ceramah;
 - b. tanya jawab antara dosen pengajar dengan Peserta Didik setelah ceramah dan apabila waktu tidak mencukupi dilanjutkan dengan pertanyaan tertulis;
- (8) Bagi Peserta Didik yang karena sesuatu hal tidak mengikuti kegiatan mata pelajaran pelengkap/faedah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diwajibkan untuk mendengarkan rekaman ceramah dan diskusi serta membuat resume, dan diserahkan kepada penanggung jawab bidang studi mata pelajaran yang terkait;

BAGIAN KETUJUH EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 16

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sespim Polri dilakukan monitoring dan evaluasi kurikulum secara berkala.

Pasal 17

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

- a. tingkat mutu dan nilai keberhasilan dari suatu proses kerja sama (evaluasi hasil belajar).
- b. tingkat efektivitas dan efisiensi jalannya proses pendidikan sesuai tujuan yang ingin dicapai (evaluasi proses).
- c. tingkat efektivitas dan efisiensi keberhasilan alumnus Sespim Polri dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Pasal 18

- (1) Sistem penilaian terhadap kurikulum disusun untuk mengetahui :
 - a. klasifikasi Peserta Didik dalam usaha mendukung Peserta Didik;
 - b. efektivitas dan efisiensi kurikulum untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Kurikulum itu sendiri.
- (2) Untuk mengetahui klasifikasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penilaian dilakukan atas dasar :
 - a. asas Widya Satyatama Mitra dalam arti evaluasi dititikberatkan pada penguasaan terhadap ilmu yang dilengkapi dengan kecakapan atau sikap profesional yang berhubungan dengan motto Sespim Polri "Sanyata Sumanasa Wira" yang berarti kebenaran adalah tujuan pengabdian yang terdalam;
 - b. prinsip pemupukan jiwa gotong royong dalam arti bahwa prestasi Peserta Didik dinilai dalam rangka hubungan kelompok dan diusahakan untuk selalu meningkatkan mutu martabat dan nama baik kelompok dengan bimbingan dari para widyaiswara tanpa mengabaikan karya perorangan menurut peranan dan kedudukannya di dalam kelompok;
 - c. asas obyektivitas terhadap evaluasi prestasi yang dicapai Peserta Didik, Validasi terhadap ukuran yang digunakan, keluasan Peserta Didik yang satu dengan yang lainnya.

- (3) Penentuan efektivitas dan efisiensi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil atau kemampuan yang diperoleh Peserta Didik, pengamatan terhadap pelaksanaan kurikulum serta pendapat Peserta Didik, mengenai komponen yang ada.

Pasal 19

Metode evaluasi yang digunakan dalam penilaian Peserta Didik adalah:

- a. metode mutlak yaitu penentuan nilai kemampuan seseorang atau nilai sesuatu, berdasarkan:
 1. standar yang telah ditentukan dengan berpegang pada norma atau jawaban yang pasti, yang didapat dari hasil pengujian ilmiah;
 2. pengamatan sehari-hari terhadap Peserta Didik dalam diskusi, kertas karya, ulangan, tes evaluasi dan penampilan.
- b. metode relatif yaitu penentuan nilai kemampuan seseorang atau nilai sesuatu yang dihubungkan atau dibandingkan dengan kemampuan Peserta Didik lainnya dalam suatu kelompok.

Pasal 20

Sasaran evaluasi dapat dilakukan terhadap:

- a. Peserta Didik, meliputi aspek-aspek:
 1. kepemimpinan;
 2. prestasi akademis, baik teori maupun praktek;
 3. kesehatan fisik dan kesamaptaaan jasmani.
- b. kurikulum, meliputi aspek-aspek :
 1. perumusan kemajuan pendidikan;
 2. struktur kurikulum;
 3. sasaran Kurikulum;
 4. metode instruksi;
 5. materi/bahan ajaran.
- c. Dosen pengajar, widyaiswara, dan perwira staf;
- d. Fasilitas, sasaran pendidikan dan pengajaran.

Pasal 21

Evaluasi dilakukan oleh :

- a Dosen, Widyaiswara, dan pejabat yang ditunjuk dengan sasaran Peserta Didik;
- b Peserta Didik, Dosen, Widyaiswara, dan Kepala Departemen dengan sasaran kurikulum yang berlaku;
- c Kasespim Polri, Direktur Akademik, Direktur Pengkajian dan Pengembangan, Kepala Bagian, dan Kepala Departemen dengan sasaran Dosen/Widyaiswara;
- d Dosen, Peserta Didik, Kepala Bagian, Kepala Departemen dengan sasaran sarana/fasilitas pendidikan dan pengajaran.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap Peserta Didik pada aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1, terdiri dari:
 - a. pengamatan terhadap perilaku Peserta Didik sehari-hari oleh para widyaiswara yang ditunjuk, meliputi:
 - 1. mental spiritual dan ideologi;
 - 2. inisiatif;
 - 3. kemampuan kerja sama;
 - 4. ketekunan;
 - 5. ketabahan;
 - 6. tanggung jawab;
 - 7. disiplin;
 - 8. kemampuan berorganisasi;
 - 9. kemampuan mengambil keputusan.
 - (a) Sosiometri, meliputi:
 - 1. watak yaitu ketekunan, disiplin dan toleransi;
 - 2. intelegensia yaitu kecerdasan dan kepemimpinan.
- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) kali dalam seminggu, kurun waktu evaluasi berdasarkan tahapan pendidikan dan sosiometri oleh Peserta Didik yang dilakukan berdasarkan tahapan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap sasaran evaluasi pada aspek akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 2, meliputi:
- a. penilaian nilai hasil ujian/tes tertulis, naskah karya perorangan, naskah karya kelompok/sindikat/kelas sedang/kelas besar dan pelaksanaan diskusi.
 - b. bobot penilajan akademis, meliputi:
 1. ujian/tes tertulis dilaksanakan dengan subyektif tes dan obyektif tes atau gabungan subyektif dan obyektif tes terhadap mata pelajaran pokok dengan aspek penilaian pada bobot penguasaan materi dan keluasan wawasan;
 2. bobot karya (bobot karya perorangan, karya sindikat, karya kelas sedang, karya kelas besar dan bobot karya perorangan akhir pendidikan);
 3. diskusi dengan aspek yang dinilai meliputi penguasaan materi, kemampuan pengkajian dan mempertahankan bobot pendapat, tanggapan maupun konsep secara lisan.
- (3) Tim Penguji adalah Dosen pengajar/Widyaiswara dan para personel lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kasespim Polri.

Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap sasaran evaluasi Peserta Didik pada aspek kesehatan dan kesamaptaaan jasmani sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a angka 3, meliputi:
- a. penelitian di bidang kesehatan dan kesamaptaaan jasmani bertumpu kepada kondisi kesehatan fisik, kesamaptaaan jasmani;
 - b. aspek penilaian :
 1. kesehatan fisik, melalui pemeriksaan medis dan laboratorium untuk mengetahui negatif/ positif penyakit infeksi, degeneratif dan adiktif (kecanduan);
 2. kesamaptaaan jasmani dilakukan melalui tes kesamaptaaan meliputi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, serta kelincahan;
- (2) Penilaian kesehatan dan kesamaptaaan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan oleh tim medis, tim kesehatan jiwa, tim jasmani dan widyaiswara yang ditunjuk.

Pasal 25

Evaluasi terhadap sasaran evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. penetapan nilai efektivitas atau validitas, dikerjakan dengan menghubungkan dan membandingkan dalam satu ukuran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada tujuan pendidikan.
- b. teknik evaluasi kurikulum menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) atau observasi melalui wawancara, dan dilakukan pada setiap akhir tahapan pendidikan, oleh masing-masing penanggung jawab materi pelajaran atau penanggung jawab masing-masing bidang studi termasuk didalamnya dosen pengajar dan/atau widyaiswara serta tim evaluasi kurikulum yang ditetapkan Lembaga Sespim Polri.

Pasal 26

- (1) Evaluasi terhadap sasaran evaluasi dosen pengajar, widyaiswara dan perwira staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi sasaran penilaian:
 - a. kepemimpinan, merupakan hasil atau kualitas kepemimpinan yang terdapat dalam sifat, sikap dan tingkah laku dosen pengajar, widyaiswara, dan perwira staf;
 - b. intelektual akademik merupakan nilai prestasi atau kemampuan dosen pengajar, widyaiswara dan perwira staf.
- (2) Faktor penilaian terhadap sasaran evaluasi dosen pengajar, widyaiswara, dan perwira staf meliputi:
 - a. sebagai dosen pengajar;
 - b. sebagai dosen peneliti.
- (3) Faktor penilaian sebagai dosen pengajar sebagai dimaksud ayat (2) huruf a. Meliputi:
 - a. penguasaan materi ajaran;
 - b. penguasaan materi ajaran secara sistematis dan logis;
 - c. kemauan mengembangkan pengetahuan;
 - d. penguasaan terhadap Peserta Didik, kelas, dan pengetahuan tentang alongins;
 - e. penilaian suara, penampilan, rasa humor, gaya pergaulan dengan Peserta Didik;
 - f. kepribadian yang memiliki kewibawaan, jujur, percaya diri, fisik baik dan bersikap adil;

/ g. pengetahuan

- g. pengetahuan tentang dasar psikososial dan perilaku individu maupun kelompok, termasuk didalamnya perkembangan individu dan proses belajar mengajar;
 - h. penguasaan tentang materi atau rencana pelajaran yang dioperasikan serta pengembangannya;
 - i. kemampuan melakukan penyuluhan, counselling terhadap individu dan kelompok dari Peserta Didik;
 - j. kemampuan membuat evaluasi yang obyektif terhadap individu maupun kelompok Peserta Didik dan disertai dengan tindakan perbaikan;
 - k. pemahaman tentang maksud dan tujuan penyuluhan dan counselling yang berlaku di Sespim Polri;
 - l. kemampuan menciptakan hubungan baik dengan Peserta Didik atau kelompok Peserta Didik;
 - m. kemampuan menciptakan hubungan baik dengan unsur pimpinan, staf dan unsur pelayanan Sespim Polri.
- d. Faktor penilaian sebagai dosen peneliti sebagai dimaksud ayat (2) huruf b. meliputi:
1. kerajinan membaca, terutama referensi yang berkaitan dengan bidang tugas-tugas yang sedang dikerjakan;
 2. kerajinan untuk menulis terutama dalam rangka pemecahan masalah yang menjadi beban tugasnya;
 3. kerajinan untuk aktif diskusi, terutama dalam rangka pemecahan masalah yang menjadi beban tugasnya;
 4. kerajinan untuk konsultasi dengan konsultan apabila dalam melaksanakan tugasnya menghadapi kesulitan.

Pasal 27

Evaluasi terhadap sasaran evaluasi fasilitas, sarana pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, harus dilakukan dengan melihat efektivitasnya di dalam mendukung proses belajar mengajar, baik yang mencakup alins dan alongins dan *dormitory*, ruang kelas/sindikat/kelas sedang/kelas besar, dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner), yang melibatkan atau dilakukan oleh Peserta Didik, dosen atau widyaiswara dan perwira staf lainnya yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan Kapolri.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan yang mengatur evaluasi dan penilaian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kasespim Polri tentang pedoman evaluasi dan penilaian.

**BAGIAN KEDELAPAN
PELAKSANAAN, WAKTU EVALUASI DAN PENILAIAN**

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan waktu penilaian dijadwalkan dan dikoordinasikan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Direktur Akademik.
- (2) Waktu penilaian adalah:
 - a. untuk Dosen dan Widyaiswara dilaksanakan secara terus menerus oleh Direktur Akademik dan Kasespim Polri yang didasarkan atas pengamatan atau informasi yang mencakup kegagalan dan keberhasilan yang dilakukan secara terus-menerus serta tidak boleh didasarkan atas beberapa kegiatan menonjol secara terpisah;
 - b. untuk Peserta Didik, dilaksanakan secara terus menerus oleh Dosen dan Widyaiswara, Kepala Departemen, Kepala Bagian, dan Tim penilai yang ditetapkan atas pengamatan/observasi dan pengujian baik yang menyangkut aktivitas Peserta Didik, konsep gagasan maupun kemampuan mengutarakan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - c. untuk fasilitas dan sarana pendidikan dan pengajaran dilakukan secara terus menerus, didasarkan atas faktor hasil pengamatan/observasi yang mencakup efektivitas mendukung proses belajar mengajar.

Pasal 30

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Peserta Didik terdiri dari:

- a. hasil evaluasi aspek kepemimpinan, dihimpun dan diserahkan kepada Kepala Korps Peserta (Kakorta) dan Kepala Korps Siswa di bawah kendali dan pengawasan Direktur Akademik;
- b. hasil evaluasi aspek kesamaptaan jasmani, dihimpun dan diserahkan kepada Kepala Korps Peserta dan Kepala Korps Siswa Sespim Polri di bawah kendali dan pengawasan Direktur Akademik;
- c. hasil evaluasi aspek akademik, dihimpun dan diserahkan kepada Kepala Bagian Pembinaan Pendidikan Sespim Polri di bawah kendali dan pengawasan Direktur Akademik;

/ d. keseluruhan

- d. keseluruhan hasil evaluasi aspek kepribadian, kesamaptaan jasmani dan akademik selanjutnya diproses oleh Kepala Bagian Pembinaan Pendidikan Sespim Polri di bawah pengawasan dan kendali Direktur Akademik;
- e. mengikutsertakan Peserta Didik dalam proses evaluasi dengan tujuan agar diperoleh bandingan obyektivitas, yang pelaksanaannya melalui Widyaiswara dan diberikan dalam bentuk pertanyaan atau kuisisioner.

BAGIAN KESEMBILAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Pemberian penghargaan kepada Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Peserta Didik yang memperoleh nilai akumulatif terbaik meliputi 3 (tiga) aspek penilaian yaitu kepemimpinan, akademik, kesehatan dan jasmani diberikan penghargaan "cendikia utama" bagi peserta didik Sespati Polri terbaik dan penghargaan "cendekia pratama" bagi peserta didik Sespim Polri.
- b. Peserta Didik yang memperoleh penilaian terhadap Naskah Akademik Perorangan terbaik, diberikan penghargaan "adi cipta utama" bagi peserta didik Sespati Polri dan penghargaan "adi cipta pratama" bagi peserta didik Sespim Polri.

BAGIAN KESEPULUH KETENTUAN LULUS DAN TIDAK LULUS

Pasal 32

- (1) Penentuan seorang Peserta Didik lulus atau tidak lulus pada akhir pendidikan dinyatakan, ditentukan oleh Dewan Kehormatan pada Sidang Dewan Sekolah dengan memperhatikan hasil penilaian akhir.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur batas nilai kelulusan dan kategori penilaian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kasespim Polri tentang pedoman dan penilaian.

Pasal 33

- (1) Peserta Didik harus mengulang ujian di bidang akademik, apabila nilai pada mata pelajaran tertentu belum memenuhi syarat kelulusan.
- (2) Mengulangi ujian/tes/her sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) kali dengan ketentuan hasil nilai ujian ulang/her bila telah lulus diberi nilai terendah nilai kelulusan pada mata pelajaran tersebut.

Pasal 34

- (1) Ketentuan lulus sebagai berikut:
- a. Peserta Didik harus mempunyai nilai akhir pada aspek kepemimpinan tidak kurang dari 700 (tujuh ratus), apabila nilai akhir kurang dari 700 (tujuh ratus) dinyatakan tidak lulus.
 - b. Peserta Didik harus mempunyai nilai akhir pada aspek akademis tidak kurang dari 600 (enam ratus) dalam setiap mata pelajaran akademis yang diujikan.
 - c. Peserta Didik harus mempunyai nilai akhir pada aspek kesehatan dan kesamaptaan jasmani dengan nilai:
 1. kesehatan fisik / tes lab tidak kurang dari 550;
 2. kesamaptaan jasmani tidak kurang dari 450;
 3. nilai akhir tidak mencapai nilai kelulusan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan di Sespim Polri atau tidak lulus.
- (2) Peserta Didik yang mempunyai nilai akhir pada aspek akademis dengan atau nilai yang diperoleh lebih kecil/di bawah nilai batas lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 2 (dua) kali dengan catatan ujian ulangan dilaksanakan apabila nilai ujian kurang dari nilai batas lulus dan dilaksanakan secara tertulis/lisan dari Dosen yang bersangkutan hasil nilai ujian ulangan merupakan nilai terendah dari nilai lulus.
- (3) Penentuan golongan kelulusan, rangking umum dan predikat kelulusan diperoleh dengan cara menggabungkan:
- a. nilai akhir bidang kepemimpinan, diambil dari nilai tahap pendidikan terakhir;
 - b. nilai akhir bidang akademik, diambil dari nilai rata-rata tiap-tiap tahap pendidikan;
 - c. nilai akhir naskah karya perorangan;
 - d. nilai kesehatan dan jasmani;

Pasal 35

- (1) Peserta Didik yang dinyatakan lulus, dapat diberikan salah satu kategori kelulusan :
- a. cenderung mampu menempuh karier selanjutnya dengan menonjol baik, diberikan "sangat memuaskan".
 - b. cenderung cukup mampu menempuh karier selanjutnya dengan baik, diberikan kategori "memuaskan".

/ c. cenderung

- c. cenderung berkembang secara wajar dalam menempuh kariernya, diberikan kategori "baik".
- d. cenderung mencapai tingkat maksimal sepadan dengan kemampuannya, diberikan kategori "cukup".

Pasal 36

Peserta Didik kehilangan status sebagai Peserta Didik, apabila:

- a. ditarik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. ditarik oleh instansi bagi Peserta Didik dari TNI dan bagi Peserta Didik dari manca negara ditarik dari negaranya;
- c. karena alasan kesehatan dengan dinyatakan oleh surat keterangan Dokter Polri dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan ;
- d. karena alasan kemiaampuan Akademik atau alasan mental Kepemimpinan yang tidak memiliki syarat dan dinyatakan tidak dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut;
- e. tidak mengikuti kegiatan lebih dari 10% secara akumulatif dari jumlah seluruh jam pelajaran;
- f. melanggar ketentuan lain yang oleh lembaga Sespim Polri tidak dapat ditolerir.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 37

- (1) Tataran kewenangan dalam pelaksanaan kurikulum sebagai berikut :
 - a. Kapolri bertanggung jawab terhadap:
 - 1. kegiatan Dewan Pendidikan dan Latihan Polri sesuai dengan Renstra Polri;
 - 2. pengerahan penyediaan Tenaga Pengajar/Widya Iswara atas usul Kasespim Polri;
 - 3. menetapkan Tema Pendidikan.
 - b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kapolri bertugas :
 - 1. mengkoordinasikan penyediaan anggaran, Tenaga Pengajar, Widya Iswara, dan pengarahan Kurikulum;
 - 2. mengkoordinasikan kegiatan, menyingkronisasikan Kurikulum.

- c. Dewan Pendidikan dan Latihan bertugas mengolah dan memberikan saran kepada Kapolri tentang mutu, tujuan Pendidikan dan jumlah Peserta Didik yang dididik.
 - d. Kasespim Polri berwenang:
 1. menjabarkan Kurikulum dalam program Pengajaran serta silabinya dalam tahun ajaran yang bersangkutan;
 2. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program pengajaran dengan Pejabat-pejabat, Dosen/Tenaga Pengajar;
 3. mengajukan usulan kepada Kapolri tentang penunjukan Tenaga Pengajar/Widya Iswara;
 4. mengadakan koordinasi dengan Dan Sesko TNI dan Dan Sesko TNI Angkatan apabila diperlukan dalam rangka kegiatan bersama antar Sesko Angkatan dan Sespim Polri;
 5. mengadakan Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Sespim Polri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kasespim Polri dibantu oleh Dewan Kurikulum/Sekolah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KURIKULUM

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pendidikan Sespim Polri berada pada Kapolri yang sehari-hari dilakukan oleh De SDM Kapolri.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan program pengajaran Sespim Polri ada pada Kasespim Polri.
- (3) Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum setiap akhir Pendidikan dikoordinasikan dengan para penganban fungsi Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, maka Peraturan yang berkaitan dengan Kurikulum Pendidikan Sespim Polri dan Kurikulum Pendidikan Sespim Polri masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 40

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



SUTANTO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : 5 TAHUN 2007**

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI POLRI

DIKREG KE-12 T.P.2007

Jakarta, 20 Februari 2007

PROGRAM PENDIDIKAN

I.	Nama Pendidikan	Pendidikan Reguler ke-12 Sespati Polri Tahun Pendidikan 2007 disingkat Sespati Polri Dikreg ke-12 T.P. 2007
II.	Lama Pendidikan	4 (empat) bulan atau 18 (delapan belas) minggu efektif atau 936 Jam Pelajaran yang terbagi dalam 3 (tiga) Tahap pendidikan.
III.	Visi Sespim Polri	Menjadikan Sespim Polri sebagai lembaga pendidikan tertinggi Polri yang menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan Polri dan penegak hukum lainnya yang memiliki profesionalisme, wawasan kepemimpinan strategi dan komitmen yang kuat terhadap integritas moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
IV.	Misi Sespim Polri	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan tingkat menengah dan tingkat tinggi Polri serta penegak hukum lainnya.2. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai kepemimpinan, penegakan hukum dan perkembangan nasional serta stabilitas Kamdagri3. Sosialisasi Paradigma Polri bidang sistem peradilan, institusi Penegakan Hukum, strategi Penegakan Hukum bagi tercapainya supremasi hukum dan terpeliharanya Kamdagri.
V.	Tujuan Pendidikan	Meningkatnya kemampuan manajemen dan kepemimpinan strategis yang berwawasan paradigma baru, bagi Perwira Menengah Polri Senior dan pejabat dari Instansi penegak hukum terkait yang memiliki kemampuan potensial dan manajerial untuk menduduki jabatan strategis dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri
VI.	Tema Pendidikan	Memantapkan kemampuan Manajerial dan Profesional Aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan Kamdagri

VII.	Focal Concern	Kajian terhadap perkembangan hukum dan sosial budaya dalam penyelenggaraan Kamdagri
VIII.	Kompetensi Pendidikan	<p>Pamen Polri yang memiliki kemampuan Manajerial Tingkat Tinggi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis perkembangan lingkungan strategis secara komprehensif dan korelatif. 2. Kemampuan merumuskan Si.enario Ancaman Kamdagri sampai dengan Jangka Panjang. 3. Kemampuan mewujudkan Superioritas Organisasi. 4. Kemampuan merumuskan Strategis dan Kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi. 5. Kemampuan akuntabilitas (pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas) yang dilandasi nilai-nilai moral.
IX.	Penjabaran Kompetensi ke dalam Kemampuan Bidang Studi Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Paradigma : Kemampuan berpikir paradigmatis dalam memahami berbagai fenomena yang selalu berubah dan berkembang baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi Penegak Hukum 2. Kajian Lingkungan Strategi : Kemampuan analisis yang tajam terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional 3. Manajemen Strategi : Kemampuan antisipatif, strategis dan paradigmatis dalam menangani berbagai fenomena dan dampak perkembangan lingkungan strategis

X.	Mata Pelajaran dan Kegiatan Khusus	
1. Bidang Studi Kajian Paradigma (5101 – 5107)		
NOMOR		MATA PELAJARAN
URUT	KODE	
1.	5101	Paradigma Organisasi Pembelajaran & Scenario Learning.
2.	5102	Analisis Strategi.
3.	5103	Komparasi Paradigma Pembangunan.
4.	5104	Pengembangan Strategi Organisasi.
5.	5105	Polisi Sipil sebagai Paradigma Baru Polri
6.	5106	Strategi memberdayakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Peran Polri dalam rangka meningkatkan Citra Polri
7.	5107	Diskusi BS. Kajian Paradigma
2. Bidang Studi Kajian Lingkungan Strategis (5201 – 5207)		
NOMOR		MATA PELAJARAN
URUT	KODE	
1.	5201	Kajian pengaruh Globalisasi terhadap Kamdagri.
2.	5202	Kajian Perkembangan Politik dan Demokrasi.
3.	5203	Kajian Perkembangan Ekonomi, Moneter dan Perbankan
4.	5204	Kajian Perkembangan Sosial.
5.	5205	Kajian Perkembangan Budaya.
6.	5206	Kajian Perkembangan Hukum dan HAM.
7.	5207	Diskusi BS. Kajian Lingkungan Strategis.
3. Bidang Studi Manajemen Strategi (5301 – 5307)		
NOMOR		MATA PELAJARAN
URUT	KODE	
1.	5301	Perpolisian Masyarakat.
2.	5302	Strategi Pembangunan Nasional dalam rangka Otonomi Daerah.
3.	5303	Kebijakan dan Strategi Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional.
4.	5304	Sistem Pemerintahan menuju terwujudnya Good Government dan Clean Government
5.	5305	Manajemen Penyelenggaraan Binkamdagri.
6.	5306	Kepemimpinan Strategis.
7.	5307	Diskusi BS. Manajemen Strategis.

4. Kegiatan Khusus (5401 – 5422)		
NOMOR		KEGIATAN KHUSUS
URUT	KODE	
1	2	3
1.	5401	Upacara Pembukaan Pendidikan.
2.	5402	Pembekalan Kasespim Polri
3.	5403	- Pembekalan Dir Akademik - Orientasi Dir Jianbang & Survei Awal - Orientasi Bidang studi BS. I, II, & III
4.	5404	Orientasi Lingkungan
5.	5405	Implementasi SAKIP
6.	5406	Penjelasan Nastrap
7.	5407	Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN)
8.	5408	- Penjelasan L.O. Tujuan KKLN - Pembekalan L.O. Tujuan KKLN
9.	5409	Evaluasi B.S. I Kajian Paradigma
10.	5410	Pembekalan Wawasan Kebangsaan (Sri Sultan HB. X)
11.	5411	Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN)
12.	5412	Evaluasi B.S. II Kajian Lingkungan Strategis
13.	5413	Evaluasi B.S. III Manajemen Strategi
14.	5414	Olah Strategi
15.	5415	Seminar Sekolah
16.	5416	Pemeriksaan Kesehatan
17.	5417	Evaluasi Nastrap
18.	5418	Pembekalan Pejabat Tinggi
19.	5419	Jam Pimpinan
20.	5420	Anev Opsdik
21.	5421	Survei Efektif
22.	5422	Pembekalan Kapolri
23.	5423	Upacara Penutupan Pendidikan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	5105	Polisi Sipil sebagai Paradigma Baru Polri		24	12	12	-	Dosen I : - Jend. Pol (P) Chaeruddin Ismail Dosen II : - Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto - Brigjen Pol Drs. F.R. Andi Lolo - KBP Drs. Wahyu Daeni, S.H.
6.	5106	Strategi memberdayakan Tugas pokok, Fungsi dan Peran Polri dalam rangka meningkatkan Citra Polri		24	12	12	-	Dosen I : - Dr. Hermawan Kartajaya Dosen II : - Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto - Brigjen Pol Drs. F.R. Andi Lolo - KBP Drs. Wahyu Daeni, S.H.
7.	5107	Diskusi BS. Kajian Paradigma		36	-	36	-	Dosen : - Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto - Brigjen Pol Drs. F.R. Andi Lolo - KBP Drs. Wahyu Daeni, S.H.
	5200	BIDANG STUDI KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS.	180					
8.	5201	Kajian Pengaruh Globalisasi terhadap kamdagri		24	12	12	-	Dosen I : - Bantarto Bandoro, S.H., M.A. Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.
9.	5202	Kajian Perkembangan Politik dan Demokrasi		24	12	12	-	Dosen I : - Dr. JB Kristiadi Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	5203	Kajian Perkembangan Ekonomi, Moneter dan Perbankan.		24	12	12	-	Dosen I : - Prof. Dr. Nen Amran, S.E. - Drs. Reydonizar, MM. Devt.M Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.
11.	5204	Kajian Perkembangan Sosial		24	12	12	-	Dosen I : - Dr. Paulus Wirutomo (Sospol) Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.
12.	5205	Kajian Perkembangan Budaya		24	12	12	-	Dosen I : - Dr. N. Jenny MT. Hardjatno (Ketua Kajian Sosbud UI) Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.
13.	5206	Kajian Perkembangan Hukum dan HAM		24	12	12	-	Dosen I : - Prof. Dr. Romli A. - Prof. DR. Abdul Gani Abdullah) Dosen II : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.
14.	5207	Diskusi BS. Kajian Lingkungan Strategis		36	-	36	-	Dosen : - Irjen Pol Drs. Suprpto - Brigjen Pol Drs. S. Damanhuri - KBP Drs. Didiek S. Triwidodo, M.M.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5300	BIDANG STUDI MANAJEMEN STRATEGIS	168					
15.	5301	Perpolisian Masyarakat		24	12	12	-	Dosen I : - Irjen Pol (P) Drs. Ronny Lihawa Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
16.	5302	Strategi Pembangunan Nasional dalam kerangka Otonomi Daerah.		24	12	12	-	Dosen I : - Prof. DR. M. Ryaas Rasyid Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
17.	5303	Kebijakan Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional		24	12	12	-	Dosen I : - Derenbang Kapolri Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
18.	5304	Sistem Pemerintahan menuju terwujudnya <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> .		24	12	12	-	Dosen I : - Drs. Taufiq Effendi, MBA Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
19.	5305	Manajemen Penyelenggaraan Binkamdagri		24	12	12	-	Dosen I : - Irjen Pol. Drs. FX. Sunarno (Deops Kapolri) Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
20.	5306	Kepemimpinan Strategi		24	12	12	-	Dosen I : - Wakapolri Dosen II : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir
21.	5307	Diskusi BS. Manajemen dan Strategis		24	-	24	-	Dosen : - Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto - Brigjen Pol Drs. Zarwan Djamaan - KBP Drs. M. Nasser Amir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5400	KEGIATAN KHUSUS	408					
1.	5401	Upacara Pembukaan Pendidikan.		3	-	-	3	- Kakorta
2.	5402	Pembekalan Kasespim Poli		6	6	-	-	- Kasespim Poli
3.	5403	- Pembekalan Dir Akademik		6	6	-	-	- Dir Akademik
		- Orientasi Dir Jianbang & Survei Awal		6	6	-	-	- Dir Jianbang
		- Orientasi Bidang studi BS. I, II, & III		6	6	-	-	- Ketua BS. I, II, III
4.	5404	Orientasi Lingkungan		9	-	-	9	- Kakorta
5.	5405	Implementasi SAKIP						
6.	5406	Penjelasan Nastrap		6	6	-	-	Dir Akademik
7.	5407	Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN)						- Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto
		- Penjelasan / Kesiapan		9	9	-	-	
		- Pelaksanaan KKLN		60	-	-	60	
		- Laporan KKLN		6	-	6	-	
8.	5408	- Penjelasan L.O. Tujuan KKLN		6	-	-	6	- Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto
		- Pembekalan L.O. Tujuan KKLN		6	-	-	6	
9.	5409	Evaluasi B.S. I Kajian Paradigma		24	-	24	-	- Dir Akademik
10.	5410	Pembekalan Wawasan Kebangsaan (Sri Sultan Hamengkubowono X)		12	12	-	-	- Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto & Kadep Jemen
11.	5411	Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN)						- Irjen Pol Drs. Dwi Purwanto
		- Penjelasan/Persiapan KKDN		6	6	-	-	
		- Pelaksanaan KKDN		60	-	-	60	
		- Laporan KKDN		6	-	6	-	
12.	5412	Evaluasi B.S. II Kajian Lingkungan Strategis		24	-	24	-	- Dir Akademik
13.	5413	Evaluasi B.S. III Manajemen Strategi		24	-	24	-	- Dir Akademik
14.	5414	Olah Strategi :						- Irjen Pol. Drs. Suprapto
		- Penjelasan Olah Strategi		3	3	-	-	
		- Pelaksanaan Olah Strategi		24	-	-	24	

LAMPIRAN "B" PERATURAN KAPOLRI
 NO. POL. : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	5415	Seminar Sekolah : - Penjelasan Seminar - Pelaksanaan Seminar		3 12	3 -	- -	- 12	- Dir Jianbang
16.	5416	Pemeriksaan Kesehatan		6	-	-	6	- Seslem / Tim Dokkes
17.	5417	Evalusi Nastrap		24	-	24	-	- Dir Akademik
18.	5418	Pembekalan Pejabat Tinggi		24	-	-	24	- Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto
19.	5419	Jam Pimpinan		6	6	-	-	- Kasespim Polri
20.	5420	Anev Opsdik		6	6	-	-	- Dir Akademik
21.	5421	Survei Efektif		6	6	-	-	- Dir Jianbang
22.	5422	Pembekalan Kapolri		6	6	-	-	- Dir Akademik
23.	5423	Upacara Penutupan Pendidikan		3	-	-	3	- Kakorta & Kakorsis
TOTAL JP			936	*	*	*	*	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

Nama Pendidikan : DIKREG KE-12 SESPATI POLRI T.P. 2007
No. Kode Bidang Studi : 5100
Bidang Studi : KAJIAN PARADIGMA / 180 JP

NOMOR		MATA PELAJARAN	JAMPEL		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
URUT	KODE		PENGAJARAN	EVALUASI			JML	T	P	MATERI	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5101	Paradigma Organisasi Pembelajaran & Scenario Learning	24	-	Peserta memiliki kemampuan merumuskan scenario perkembangan situasi keamanan dalam negeri dalam jangka panjang	- Organisasi pembelajaran - System thinking - Skenario learning (focus bahasan : kondisi keamanan di Aceh pasca MoU Helsinki dan lahirnya UU Pemerintah Aceh)	24	12	12	-	- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
2.	5102	Analisis Strategis	24	-	Peserta memiliki kemampuan menganalisis perkembangan lingkungan strategis serta merumuskan strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi dan menanggulangi	- Visi dan misi organisasi - Pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap organisasi - Analisis SWOT - Perumusan strategi dan kebijakan (Fokus bahasan : perumusan strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok Polri)	24	12	12		- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN / KLS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	5103	Komparasi Paradigma Pembangunan	24	-	Peserta mampu berpikir paradigmatic dalam memahami dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman paradigma - Perubahan dan pergeseran paradigma - Paradigma pembangunan di Indonesia (Fokus bahasan : Strategi Polri dalam mengantisipasi pergeseran paradigma di era reformasi) 	24	12	12	-	<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
4.	5104	Pengembangan Strategi Organisasi	24	-	Peserta mampu menganalisis kondisi dan posisi organisasi serta mampu mengembangkan strategi guna mewujudkan superioritas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan organisasi - Proses pengembangan strategi organisasi - Posisi organisasi - Strategi meningkatkan superioritas organisasi Polri sebagai alat negara di bidang keamanan 	24	12	12	-	<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER ORANG AN/SIN / KLS.
5.	5105	Polisi Sipil sebagai Paradigma Kepolisian	24	-	Peserta memiliki wawasan yang mendalam tentang paradigma Polisi Sipil dalam suasana kehidupan dan semangat civil society	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Polisi Sipil (Civilian Police) - Ciri-ciri Polisi Sipil - Strategi memantapkan kultur Polisi Sipil (Fokus bahasan : Strategi memantapkan kultur Polisi Sipil dalam menyelenggarakan tugas Bangkuat, Binkuat, dan operasional) 	24	12	12	-	<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/POK/ ANGK.
6.	5106	Strategi memasyarakatkan Tugas pokok, Fungsi, dan Peran Polri dalam rangka meningkatkan Citra Polri	24	-	Peserta memiliki kemampuan analisis dalam merumuskan langkah-langkah strategi guna meningkatkan citra Polri	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep marketing - 9 Elemen marketing sustainability loop - Membangun brand Polri (Fokus bahasan : Strategi Polri dalam meningkatkan citra melalui analisis sustainability perkembangan pemerintahan di Indonesia) 	24	12	12	-	<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN / KLS.

LAMPIRAN "C" PERATURAN KAPOLRI
 NO. POL. : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	5107	Diskusi BS. Kajian Paradigma	24	-	Agar mampu memahami tentang implikasi sebagai teori dan asumsi secara komprehensif sehingga mampu memunculkan konsep yang bersifat strategis.	- Mendiskusikan hasil pengajaran dari BS. I dan merumuskan strategi dan implementasi penegak hukum dari studi kajian paradigma - Memaparkan dalam naskah kelompok / angkatan	36	-	36	-	- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN / KLS.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Dr. SUTANTO
 JENDERAL POLISI

RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

Nama Pendidikan : DIKREG KE-12 SESPATI POLRI T.P. 2007
No. Kode Bidang Studi : 5200
Bidang Studi : KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS / 180 JP

NOMOR		MATA PELAJARAN	JAMPEL		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
URUT	KODE		PENGAJARAN	EVA-LUASI			JML	T	P	MATERI	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5201	Kajian Pengaruh Globalisasi terhadap Kamdagri	24	-	Menjelaskan posisi Indonesia di lingkungan global dan pengaruh-nya terhadap kondisi Dalam Negeri.	- Perkembangan lingkungan Nasional, regional dan internasional - Faktor-faktor yang berpengaruh - Pengaruhnya terhadap pembangunan nasional, khususnya Kamdagri.	24	12	12		- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
2.	5202	Kajian Perkembangan Politik dan Demokrasi.	24	-	- Menjelaskan perkembangan politik, demokrasi dan gejala kecenderungan serta dampaknya. - Menjelaskan konsepsi dasar bijak bidang politik - Menjelaskan masalah bidang politik dan demokrasi.	- Perkembangan politik (Nasional, Regional, Internasional) - Gejala kecenderungan dan dampaknya terhadap Kamdagri. - Faktor-faktor yang berpengaruh. - Tantangan dan tuntutan masyarakat - Perkembangan demokrasi - Pengaruhnya bagi bangsa dan negara. - Pelaksanaan demokrasi - Konsepsi strategis antisipasi dampak negatif bagi bangsa dan negara. - Strategi dan implementasi penegakan hukum dalam perkembangan politik dan demokrasi.	24	12	12		- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	5203	Kajian Perkembangan Ekonomi, Moneter dan Perbankan	24	-	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan perkembangan ekonomi, moneter BAKN serta gejala kecenderungan dan dampaknya. - Menjelaskan konsepsi dasar kebijaksanaan bidang ekonomi, moneter dan perbankan. - Menjelaskan masalah bidang ekonomi, moneter dan perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan ekonomi (Nasional, regional dan internasional). - Gejala kecenderungan dan dampaknya terhadap kamdagri. - Faktor-faktor yang berpengaruh. - Perkembangan keuangan dan perbankan. - Strategi dan implementasi penegakan hukum dalam perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan. 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
4.	5204	Kajian Perkembangan Sosial	24		<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tentang kondisi sosiologis bangsa Indonesia di tengah perubahan global. - Potensi konflik sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan sosial bangsa Indonesia - Kerawanan sosial. - Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi konflik sosial. - Konsep strategi penanggulangan dampak negatif bagi bangsa dan negara. 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
5.	5205	Kajian Perkembangan Budaya	24		<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan perkembangan budaya global dan pengaruhnya bagi bangsa dan negara khususnya kamdagri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan budaya global (nasional, regional, dan internasional). - Pemahaman tentang peradaban - Benturan peradaban terhadap kamdagri - Faktor-faktor yang berpengaruh - Strategi dan implementasi dalam mengantisipasi benturan peradaban. 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	5206	Kajian Perkembangan Hukum dan HAM.	24	-	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan hukum dan HAM (nasional, regional dan internasional) - Gejala kecenderungan dan dampaknya bagi kamdagri. - Faktor-faktor yang mempengaruhi - Tantangan dan tuntutan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan Hukum dan HAM (Nasional, regional dan internasional). - Gejala kecenderungan dan dampaknya bagi Kamdagri. - Faktor-faktor yang berpengaruh - Tantangan dan tuntutan masyarakat - Strategi dan implementasi penegakan hukum dalam perkembangan hukum dan Ham. 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
7.	5207	Diskusi BS Kajian Lingkungan Strategis.	36	-	<p>Agar mampu mengkaji dan menganalisa pengaruh/dampak perkembangan lingstra bagi Indonesia dan upaya menangkal dan mengantisipasi guna mewujudkan supremasi hukum dan kamdagri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisir dan menjelaskan tentang kecenderungan lingstra - Menganalisa dampak situasi kamtibmas dalam upaya memelihara kamtibmas. - Konsep strategi dalam menghadapi pengaruh lingstra guna memantapkan kemampuan manajerial aparat penegak hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dalam rangka memelihara kamdagri. 	36	-	36		<ul style="list-style-type: none"> - D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

Nama Pendidikan : DIKREG KE-12 SESPATI POLRI T.P. 2007
No. Kode Bidang Studi : 530
Bidang Studi : KAJIAN MANAJEMEN STRATEGIS / 168 JP


NOMOR		MATA PELAJARAN	JAMPEL		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
URUT	KODE		PENGAJARAN	EVALUASI			JML	T	P	MATERI	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5301	Perpolisian Masyarakat	24	-	Memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Community Policing	Memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Community Policing.	24	12	12	-	- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.
2.	5302	Strategi Pembangunan Nasional dalam kerangka otonomi daerah	24	-	Memberikan penjelasan tentang strategi pembangunan nasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pembangunan hukum nasional dan Otda - Asas-asas pembangunan nasional, dan otonomi daerah. - Strategi Pembangunan Nasional. - Implikasi dalam pembangunan nasional di daerah. - Peluang dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. - Konsepsi strategis dan implementasi dalam rangka Otonomi Daerah di masa Mendatang 	24	12	12		- C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN/ KLS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5303	Kebijakan dan Strategi Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional	24	-	Memberikan penjelasan tentang Kebijakan dan Strategi Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang Kebijakan Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional - Penjelasan tentang Strategi Polri di bidang Kamdagri dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER ORANG AN/SIN / KLS.
4	5304	Sistem Pemerintahan menuju terwujudnya clean government dan good government	24	-	Menjelaskan kerangka teori, konsep dan asumsi tentang berbagai sistem pemerintahan serta perkembangan administrasi publik dan pengaruhnya terhadap reformasi administrasi publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem kenegaraan menurut UUD 1945 - Konsep organisasi pemerintahan Indonesia - Perspektif reformasi administrasi publik (New Paradigms of Government and Reinventing Government) - Strategi dan implementasi Penegak Hukum dalam mewujudkan Clean Government dan good government 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER-ORANG AN/SIN / KLS.
5	5305	Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Kamdagri	24	-	Memahami tentang manajemen penyelenggaraan Pembinaan kamdagri.	Teori, konsep dan pelaksanaan manajemen Pembinaan Kamdagri dengan memperhatikan faktor2 lingkungan strategis.	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER ORANG AN/SIN / KLS.

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
6.	5306	Kepemimpinan Strategis.	24	-	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penjelasan tentang kepemimpinan organisasi yang berorientasi kepada masa depan yaitu pelaksanaan tugas secara profesional dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang terus mengalami perubahan menuju masyarakat madani dan modern. - Agar para peserta dapat menyusun dan menetapkan visi dan misi organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang. - Memahami/mendalami akuntability public. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen-komponen dasar kepemimpinan strategis - Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap organisasi. - Leadership action. - Leadership participations. - System Thinking. 	24	12	12		<ul style="list-style-type: none"> - C/D - BUAT NASKAH PER ORANG AN/SIN/ KLS.
7.	5307	Diskusi BS. Kajian Manajemen Strategi	24	-	Memahami tentang implikasi berbagai pengelolaan dan penanganan situasi dan kondisi yang cenderung berubah dengan cepat secara komprehensif sehingga mampu memunculkan konsep yang bersifat strategis.	<ul style="list-style-type: none"> - Memadukan semua MP. BS. III dalam suatu konsepsi manajemen strategik dalam tugas pembinaan keamanan. - Memaparkan dalam naskah kelompok / angkatan 	24	-	24		<ul style="list-style-type: none"> - D - BUAT NASKAH PER ORANG AN/SIN/ KLS

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


 Drs. SUTANTO
 JENDERAL POLISI

RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

Nama Pendidikan : DIKREG KE-12 SESPATI POLRI T.P. 2007
No. Kode Bidang Studi : 5400
Bidang Studi : KEGIATAN KHUSUS/ LUAR KAMPUS

NOMOR		MATA PELAJARAN	JAMPEL		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
UR UT	KODE		PENGAJARAN	EVALUASI			JML	C/T	D	P	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5405	-Implementasi Sakip	12		Memberikan pemahaman kepada Peserta tentang akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.	Memberikan pemahaman kepada Peserta tentang akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.	12	9	3	-	C
2.	5410	Ceramah Wawasan Kebangsaan	6	-	- Menjelaskan tentang Wawasan Kebangsaan agar peserta dapat memahami akar kebangsaan sehingga membentuk bangsa Indonesia yang dikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda	- Menemukan inti konsep Bhineka Tunggal Ika - Memelihara persatuan bangsa dengan tetap memiliki perasaan saling menghormati (melalui bingkai budaya) - Memiliki kehormatan sebagai bangsa dimata bangsa lain Strategi dan Implementasi Penegak Hukum dalam bingkai Wawasan Kebangsaan	12	12	-	-	C

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5406 5417	- Penjelasan - Evaluasi Nastrap & Evaluasi Nastrap Terbaik	6	24	Memberikan kemampuan peserta menuangkan buah pikiran/ide berdasarkan teori atau kerangka ilmiah dan mampu mempertahankan ide/buah pikirannya di depan penguji.	Memadukan semua MP, wawasan dan pikiran/ide dalam suatu naskah yang dipaparkan di depan tim penguji oleh perorangan.	30	6	24	-	- C/D - BUAT NAS- TRAP - DIPAPAR- KAN & - DIUJIKAN
5415	- Penjelasan Seminar - Pelaksanaan Seminar	6 12		Memberikan kemampuan peserta untuk mampu mengaplikasikan semua materi pelajaran yang diterima di pendidikan dalam suatu kerangka pemikiran, yang komprehensif dan strategis.	- Persiapan - Pelaksanaan - Penyusunan laporan (sindikat & angkatan) - Paparan (naskah sindikat & Angkatan)	18	6		12	C/D/P BUAT NASKAH PERORA- NGAN/SINDI/ KELAS
5411	- Penjelasan KKDN - Pelaksanaan KKDN - Susun & Paparan Laporan KKDN	6 60 6	-	Menjelaskan pelaksanaan penelitian, tata tertib, koordinasi dan sistem pelaporan.	- Sasaran penelitian tentang strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah - Mekanisme pelaksanaan. - Wasdal - Pelaporan	72	6	6	60	- C/D/P - BUAT NASKAH PER- ORANG- AN / SIN / KLS & PAPARAN
5407 5408	- Penjelasan & Kesiapan KKLN - Penjelasan & Pembekalan SLO - Pelaksanaan KKLN - Susun & Paparan Laporan KKLN	9 12 60 6		- Menjelaskan gambaran umum tentang hal-hal yang relevan dengan rencana kunjungan, dan hal-hal yang dianggap penting oleh Duta Besar. - Peserta dapat menganalisis problem aktual di bid. Gakkum dan kamdagri terhadap negara yang dikunjungi.	- Keadaan umum negara yang akan dikunjungi. - Hal-hal yang khas dari negara yang akan dikunjungi. - Manfaat terhadap hubungan kedua negara. - Kebijakan Gakkum - Kebijakan yan mas	87	9 12	6	60	C/D/P - BUAT NASKAH PER- ORANG- AN / SIN / KLS & PAPARAN
5418	Ceramah Pembekalan Pejabat Tinggi Negara	24	-	Memahami tentang tugas dan peranan dari departemen yang dipimpinnya oleh pejabat yang bersangkutan	- Kebijakan Pemerintah di bidang Departemen yg bersangkutan. - Program Kerja bidang departemen yang ber-sangkutan.	24	24	-	-	- C - BUAT NAS- KAH PER- ORANGAN / SIN / KLS & PAPARAN

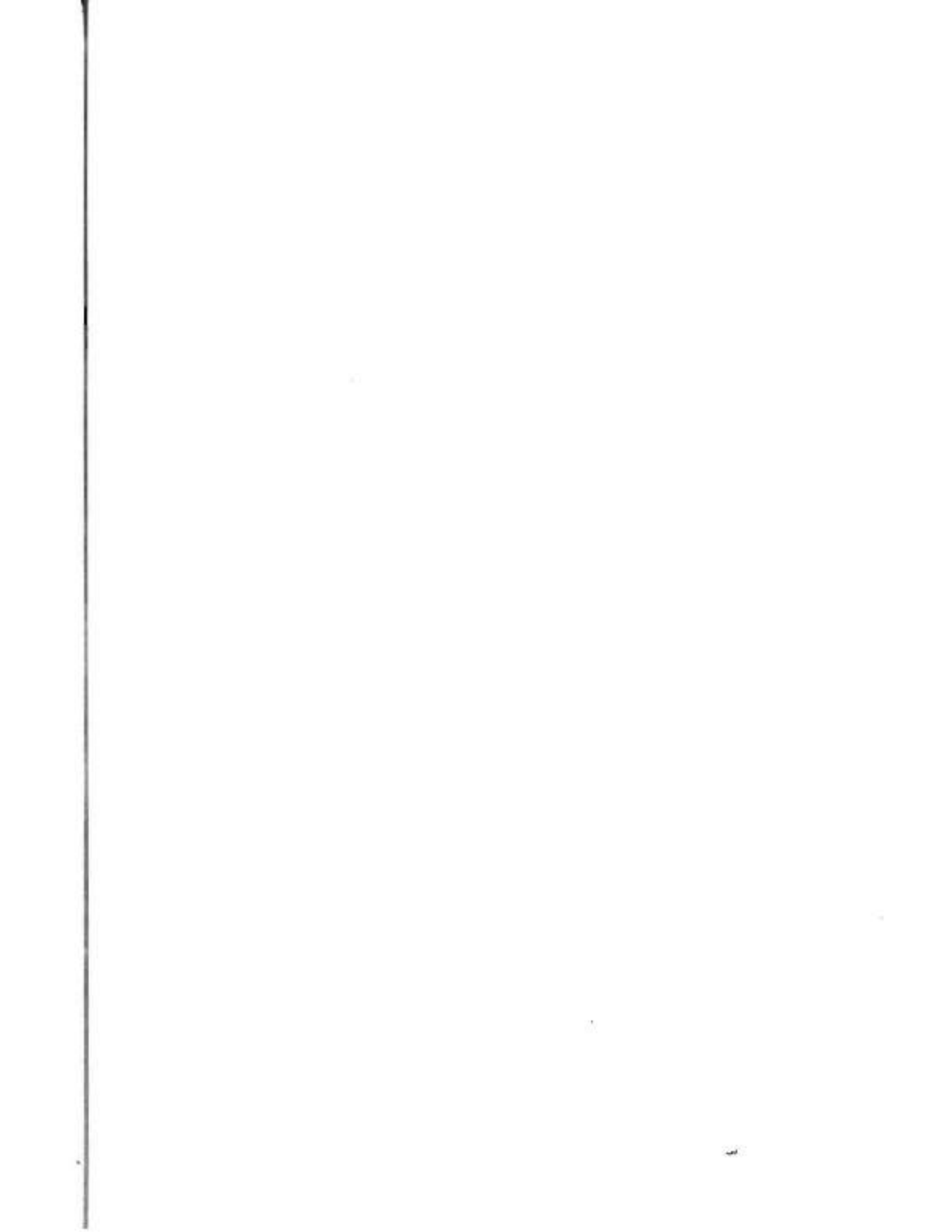
LAMPIRAN "F" PERATURAN KAPOLRI
 NO. POL : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					- Peserta memaparkan hasil laporan yg telah disusun secara komprehensif.	- Kebijakan keamanan dalam negeri negara yang akan dikunjungi.					
8.	5414	- Persiapan Lat Olah Strategi - Pelaksanaan Lat Olah Strategis	3 24	-	Mengaplikasi pola pikir dalam penugasan di lapangan secara lintas sektoral setingkat Polda		27	3	-	24	- BUAT NASKAH

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,







LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN SESPIM POLRI

DIKREG KE-44 T.P.2007

Jakarta, 20 Februari 2007

PROGRAM PENDIDIKAN

I.	Nama Pendidikan	Pendidikan Sespim Polri Reguler ke-44 Tahun Pendidikan 2007 disingkat Sespim Polri Dikreg ke-44 T.P. 2007.
II.	Lama Pendidikan	5 (lima) bulan atau 22 (dua puluh dua) minggu efektif atau 1209 Jam Pelajaran yang terbagi dalam 2 (dua) Tahap pendidikan.
III.	Visi Sespim Polri	Menjadikan Sespim Polri sebagai lembaga pendidikan tertinggi Polri yang menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan Polri dan penegak hukum lainnya yang memiliki profesionalisme, wawasan kepemimpinan strategi dan komitmen yang kuat terhadap integritas moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
IV.	Misi Sespim Polri	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan tingkat menengah dan tingkat tinggi Polri serta penegak hukum lainnya.2. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai kepemimpinan, penegakan hukum dan perkembangan nasional serta stabilitas Kamdagri3. Sosialisasi Paradigma Polri bidang sistem peradilan, institusi Penegakan Hukum, strategi Penegakan Hukum bagi tercapainya supremasi hukum dan terpeliharanya Kamdagri.
V.	Tujuan Pendidikan	Mengembangkan kemampuan manajerial Perwira Menengah Polri sebagai Polisi Sipil yang mahir, terpuji dan patuh hukum
VI.	Tema Pendidikan	"Memantapkan kemampuan Manajerial Polri dalam rangka mewujudkan Kamdagri "
VII.	Kompetensi Pendidikan	Pamen Polri yang memiliki kemampuan Manajerial Tingkat Menengah meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan mengenali, mencermati dan memahami perkembangan lingkungan strategis dan memprediksi ancaman kamtibmas sampai jangka sedang.

		<p>2. Kemampuan :</p> <p>a. Mengaudit dan meningkatkan kondisi kesehatan organisasi (organization health audit).</p> <p>b. Mengukur persepsi masyarakat terhadap Polri.</p> <p>3. Kemampuan menyelenggarakan manajemen keamanan pada tingkat menengah dan membangun kemitraan dalam rangka mendukung tugas Polri.</p> <p>4. Kemampuan mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok.</p> <p>5. Kemampuan akuntabilitas (pertanggungjawaban pelaksanaan tugas) yang dilandasi nilai-nilai moral.</p>
VIII.	<p>Penjabaran Kompetensi ke dalam Kemampuan Mata Pelajaran</p>	<p>1. Hukum dan Perundang-Undangan :</p> <p>a. memahami dan menguasai perkembangan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kepolisian;</p> <p>b. memahami perkembangan kasus-kasus menonjol yang dihadapi Polri serta mampu menerapkan teori hukum dan perundang-undangan dalam pemecahannya.</p> <p>2. Pengetahuan Sosial (ilmu dan kemasyarakatan) :</p> <p>a. mengamalkan wawasan dasar dan aspek-aspek politik nasional yang terkait dengan tugas Kepolisian.</p> <p>b. mengidentifikasi sosial budaya dan masalah-masalah sosial yang terkait dengan tugas-tugas Kepolisian.</p> <p>c. menguasai dasar-dasar teori dan pemahaman tentang perilaku sosial;</p> <p>d. menguasai dasar-dasar teori perubahan sosial;</p> <p>e. menganalisis masalah-masalah sosial</p> <p>f. mengetahui permasalahan di bidang perdagangan, pasar modal, perbankan dan keuangan, dan ketenagakerjaan, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.</p>

		<p>3. Profesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memahami ketentuan atau landasan yang mengatur tentang profesi Kepolisian; b. memahami dan mampu mengaplikasikan strategi perpolisian masyarakat; c. memahami tuntutan modernisasi Polri dalam menguasai perkembangan teknologi guna mendukung tugas-tugas Kepolisian; d. mampu membangun dan mengembangkan hubungan kerja dengan instansi lain guna mendukung tugas-tugas Polri; <p>4. Manajemen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan manajemen keamanan tingkat menengah; b. mengimplementasikan pelaksanaan tugas bidang operasional/ pembinaan pada organisasi satuan kewilayahan dan satuan fungsi; c. menjabarkan kebijaksanaan pimpinan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugasnya; d. mengenali semua potensi baik internal maupun eksternal serta mampu memberdayakannya untuk mencapai tujuan organisasi; e. menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi secara komprehensif, dan mencari solusi secara cepat dan tepat; f. menerapkan metode dan teknik kepemimpinan strategik disesuaikan dengan organisasi Polri; g. menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. <p>5. Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengenali perkembangan lingkungan strategis yang berdampak pada masalah keamanan; b. menyusun prediksi ancaman sampai dengan jangka sedang; c. menyusun produk perencanaan strategis di lingkungan Polri.
--	--	--

IX. Mata Pelajaran dan Kegiatan Khusus		
1. Bidang Studi Hukum dan Perundang-undangan (Kode B4101 - B4106)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1.	B4101	M.P. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
2.	B4102	M.P. Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan dan mencegah Illegal Logging
3.	B4103	M.P. Kebijakan Pemerintah dalam bidang Moneter/ Perbankan serta berbagai bentuk Tindak Pidana dalam bidang Moneter/Perbankan
4.	B4104	M.P. Politik Hukum
5.	B4105	M.P. Penegakan Hukum Cyber Crime
6.	B4105	M.P. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hasil Laut
2. Bidang Studi Pengetahuan Sosial (Kode B4201 - B4206)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1.	B4201	M.P. Desain Survei
2.	B4202	M.P. Modernisasi Polri dalam rangka menghadapi Tantangan Global
3.	B4203	M.P. Perkembangan Otonomi Daerah
4.	B4204	M.P. Polisi Sipil sebagai Paradigma Baru Polri
5.	B4205	M.P. Strategi Polmas
6.	B4206	M.P. Polri dan HAM
3. Bidang Studi Profesi (Kode B4301 - B4306)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1.	B4301	M.P. Penanggulangan Terorisme di Indonesia
2.	B4302	M.P. Etika Profesi Polri
3.	B4303	M.P. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
4.	B4304	M.P. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
5.	B4305	M.P. Lingkungan Hidup
6.	B4306	M.P. Akuntabilitas Publik Pelaksanaan Tugas Polri
4. Bidang Studi Manajemen (Kode B4401 - B4406)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1.	B4401	M.P. Manajemen SDM Polri
2.	B4402	M.P. Manajemen Keuangan dan Anggaran Polri
3.	B4403	M.P. Manajemen Operasional Polri
4.	B4404	M.P. Manajemen Konflik
5.	B4405	M.P. Manajemen Pengawasan
6.	B4406	M.P. Manajemen Keamanan

5. Bidang Studi Strategi (Kode B4501 - B4506)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1.	B4501	M.P. Perkembangan Lingkungan Strategi
2.	B4502	M.P. Metode dan Prediksi
3.	B4503	M.P. Manajemen Strategi
4.	B4504	M.P. Sisrenstra Polri dan Implementasinya
5.	B4505	M.P. Kepemimpinan Strategi
6.	B4506	M.P. Peranan Polri Dalam Siskamnas
6. Kegiatan Khusus (Kode B4001 – B4024)		
NOMOR URUT	NOMOR KODE	MATA PELAJARAN
1	2	3
TAHAP – I		
1.	B4001	Upacara Pembukaan Pendidikan
2.	B4002	Orientasi Lingkungan
3.	B4003	Pembekalan Awal Kasespim Polri
4.	B4004	Orientasi Pendidikan
5.	B4005	Survei Penelusuran bakat dan kepemimpinan (sosiometri)
6.	B4006	Behaviour Profiling & Mind Management
7.	B4007	Pra Test /Test Kesehatan & Jasmani Tahap Awal
8.	B4008	Management Course (MC)
9.	B4009	Pembekalan (SAKIP & Tokoh Polri)
10.	B4010	Teknik Penulisan Naskap
11.	B4011	Evaluasi Tahap I
12.	B4012	Diskusi Tahap I
TAHAP – II		
13.	B4013	Pelatihan dari IOM-SCN dalam rangka KKL
14.	B4014	Evaluasi Tahap II
15.	B4015	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) : - Persiapan KKL - Pelaksanaan KKL
16.	B4016	Diskusi Tahap II
17.	B4017	Latihan Olah Taktis : - Persiapan Latihan Olah Taktis - Pelaksanaan Latihan Olah Taktis
18.	B4018	Seminar : - Persiapan Seminar - Pelaksanaan Seminar
19.	B4019	Test Kesehatan & Jasmani Tahap Akhir
20.	B4020	Pembekalan Akhir - Kapolri, dl
21.	B4021	- Evaluasi Naskap - Perbaikan Naskap - Evaluasi Naskap Terbaik

6 LAMPIRAN "A" PERATURAN KAPOLRI
NO.POL : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3
22.	B4022	Jam Pimpinan
23.	B4023	Anev Opsdik
24.	B4024	Survei Efektif (Sosiometri)
25.	B4025	Upacara Penutupan Pendidikan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



RANGKA PELAJARAN POKOK

NAMA PENDIDIKAN : PENDIDIKAN REGULER SESPIM POLRI
NO. KODE : B4000 - B4500
LAMA PENDIDIKAN : 5 BULAN / 22 MINGGU EFEKTIF / 30 MP & 25 GIATSUS / 1209 JP @ 40 MENIT

NOMOR		BIDANG STUDI / MATA PELAJARAN / KEGIATAN KHUSUS	JAM PELAJARAN	KLASIFIKASI			METODE			TAHAP	PENANGGUNG JAWAB
URUT	KODE			M	P	F	C/K	D/A	T/U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		KEGIATAN KHUSUS	624								
1.	B4001	Upacara Pembukaan Pendidikan	3	X	-	-	-	3	-	I	Kakoris
2.	B4002	Orientasi Lingkungan	12	-	-	X	-	12	-	I	Kakorsis
3.	B4003	Pembekalan Awal Kasespim Polri	6	-	-	X	6	-	-	I	Kabag Bindik
4.	B4004	Orientasi Pendidikan	27	-	-	X	27	-	-	I	Dir Akademik
5.	B4005	Survei Penelusuran bakat dan kepemimpinan (sociometri)	3	X	-	-	-	3	-	I	Dir Jianbang
6.	B4006	Behavior Profiling & Mind Management	24	X	-	-	-	24	-	I	Kadep Kumdang
7.	B4007	Pre Test / Tes Kesehatan & Jasmani Tahap Awal	24	X	-	-	-	-	24	I	Kakorsis
8.	B4008	Management Course (MC)	60	X	-	-	-	60	-	I	Kadep Manajemen
10.	B4010	Teknik Penulisan Naskap	9	-	X	-	-	9	-	I	Kabag Bindik
11.	B4011	Evaluasi Tahap I	36	X	-	-	-	-	36	I	Kadep Pengsos
12.	B4012	Diskusi Tahap I	36	X	-	-	-	36	-	I	Kadep Strategi
13.	B4013	Pelatihan dari IOM-SCN dalam rangka KKL	36	X	-	-	-	36	-	II	Kadep Kumdang
14.	B4014	Evaluasi Tahap II :	36	X	-	-	-	36	-	II	Kadep Kumdang
15.	B4015	Kulliah Kerja Lapangan (KKL) : - Persiapan KKL - Pelaksanaan KKL	72	X	-	-	-	12	-	II	Kadep Kumdang
				X	-	-	-	60	-		
16.	B4016	Diskusi Tahap II	36	X	-	-	-	36	-	II	Kadep Kumdang
17.	B4017	Latihan Olah Taktis : - Persiapan Latihan Olah Taktis - Pelaksanaan Latihan Olah Taktis	60	X	-	-	-	12	-	II	Kabag Jarlat
				X	-	-	-	48	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	B4018	Seminar (gabung dengan Sespati Polri): - Persiapan Seminar - Pelaksanaan Seminar	21	X X	- -	- -	- -	9 12	- -	II	Dir Jianbang
19.	B4019	Tes Kesehatan & Jasmani Tahap Akhir	12	X	-	-	-	-	12	II	Kakorsis
20.	B4020	Pembekalan Pejabat - Kapolri	24	-	X	-	-	24	-	II	Kabag Jarlat
21.	B4021	Naskap : - Evaluasi Naskap - Perbaikan Naskap - Evaluasi Naskap Terbaik	48	X X X	- - -	- - -	- - -	- 12 -	24 - 12	II	Kabag Bindik
22.	B4021	Jam Pimpinan (Kasespim Polri)	6	-	X	-	-	6	-	II	Kasespim Polri
23.	B4022	Anev Opsdik	3	X	-	-	-	3	-	II	Dir Akademik
24.	B4023	Sosiometri & Survei Efektif	6	X	-	-	-	6	-	II	Dir Jianbang
25.	B4024	Upacara Penutupan Pendidikan	6	X	-	-	-	6	-	II	Kakorta / Kakorsis
II.	B4100	BS. KUMDANG	108								
1.	B4101	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : Ketua KPK (Taufiqrahman Ruki) Dosen II : 1. KBP. Drs. Noer Ali 2. KBP. Drs. Hirdiono Adi, SH
2.	B4102	Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan dan mencegah Illegal Logging	24	X	-	-	12	12	-	II	Dosen I : Menhut Dosen II : 1. KBP. Drs. Sujitno 2. KBP. Drs. Edy Sugianto
3.	B4103	Kebijakan Pemerintah dalam bidang Moneter/ Perbankan serta berbagai bentuk Tindak Pidana dalam bidang Moneter/Perbankan	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : Drs. Agus Daryanto, M.B.A. Dosen II : 1. KBP. Drs. Bambang hermanu 2. KBP. Drs. THL. Tobing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	B4104	Politik Hukum	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : -Dekan Fak Hukum UNPAD Dosen II : 1. KBP. Drs. Hendrawan, SH
5.	B4105	Penegakan Hukum Cyber Crime	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : -Bareskrim Polri - Edmun Makarim, SH Dosen II : 1. KBP. Drs. Hendrawan, SH
6.	B4106	Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hasil Laut	24	X	-	-	12	12	-	II	Dosen I : - Meneg Kelautan Asdos II : 1. KBP. Drs. Harry Widjastono 2. KBP. Johannes Gotly, BSc
III.	B4200	BS. PENGOSOS	108								
1.	B4201	Mendesain Survei Kesatuan Dan Persepsi Masyarakat	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : DR. Widi & Tim Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Situmorang
2.	B4202	Modernisasi Polri dalam rangka menghadapi Tantangan Global	15	X	-	-	12	-	3	I	Dosen I : - James Sitorus Dosen II : 1. KBP. Drs. Sujitno
3.	B4203	Perkembangan Otonomi Daerah	15	X	-	-	12	-	3	I	Dosen I : - Ketua LAN RI Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Situmorang
4.	B4204	Polisi Sipil sebagai Paradigma Baru Polri	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen : - Jend. Pol (P) Drs. Chaerudin Ismail, S.H., M.H. Dosen II : 1. KBP. Drs. Affan Richwanto 2. KBP. Drs. Elan Subilan, SH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	B4205	Strategi Polmas	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - IOM Dosen II : 1. KBP. Drs. Affan Richwanto 2. KBP. Drs. Pi. Tobing
6.	B4205	Polri dan HAM	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - Komnas HAM Dosen II : 1. KBP. Mutiara Hanum, SE 2. KBP. Drs. J. Pieter Slooy
IV.	B4300	BS. PROFESI	117								
1.	B4301	Penanggulangan Terorisme di Indonesia	24	X	-	-	12	12	-	II	Dosen I : - Brigjen Pol. Drs. Bekto Suprpto Dosen II : 1. KBP. Drs. S. Harunantyo 2. KBP. Drs. Roeslan Nicholas
2.	B4302	Etika Profesi Polri	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - Kadiv Propam Polri Dosen II : 1. KBP. Drs. Johni pol Latuperisa 2. KBP. Drs. A. Iskandar Nasution
3.	B4303	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - P P A T K Dosen II : 1. KBP. Drs. S. Harunantyo 2. KBP. Drs. Roy Raymond
4.	B4304	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - Kalakhar BNN Dosen II : 1. KBP. Drs. Alief Seryono 2. KBP. Drs. Syamsul Hidayat

LAMPIRAN "B" PERATURAN KAPOLRI
 NO.POL. : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	B4305	Lingkungan Hidup	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - Bapedal Dosen II : 1. KBP. Drs. Bambang Hermanu
6.	B4306	Akuntabilitas Publik Pelaksanaan Tugas Polri	24	X	-	-	12	12	-	II	Dosen I : Luhut M.D. Pangaribuan, SH., LLM Dosen II : 1. KBP. Drs. Wahyu Daeni, SH 2. KBP. Drs. Edy Sugianto
V.	B4400	BS. MANAJEMEN	126								
1.	B4401	Manajemen SDM Polri	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - De SDM Polri Dosen II : 1. KBP. R. Hidayat H 2. KBP. Drs. THLTobing
2.	B4402	Manajemen Keuangan dan Anggaran Polri	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - Kapusku Polri Dosen II : 1. KBP. Mutiara Hanum, SE 2. KBP. Johannes Gotty, BSc
3.	B4403	Manajemen Operasional Polri	15	X	-	-	12	-	3	I	Dosen I : - Deops Kapolri Dosen II : 1. KBP. R. HidayatH 2. KBP. Drs. LOM Marpaung
4.	B4404	Manajemen Konflik	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - Dr. Andrianus Meliala Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Taufik Ansorie, SH., MM. 2. KBP. Drs. Johnipol Latuperrisa
5.	B4405	Manajemen Pengawasan	15	X	-	-	12	-	3	II	Dosen I : - Irwasum Polri Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Taufik Ansorie, SH., MM. 2. KBP. Drs. PL. Tobing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	B4406	Manajemen Keamanan	24	X	-	-	12	-	12	I	Dosen I : Korsaahli Kapolri Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Nasser Amir 2. KBP. Drs. LOM Marpaung
VI.	B4500	BS. STRATEGI	126								
1.	B4501	Perkembangan Lingkungan Strategi	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - Kabaintelkam & Tim Dosen II : 1. KBP. Drs. Suhartono 2. KBP. Drs. A. Iskandar Nasution
2.	B4502	Metode Prediksi dan Antisipasi	15	X	-	-	12	-	3	I	Dosen I : - Prof. DR. Muhammad Med Dosen II : 1. KBP. Drs. Suhartono 2. KBP. Drs. Syamsul Hidayat
3.	B4503	Manajemen Strategi	15	X	-	-	12	-	3	I	Dosen I : - Dr. Jen Z.A. Hans Dosen II : 1. KBP. Drs. Wahyu Daeni 2. KBP. Drs. Elan Subilan, SH
4.	B4504	Sisrenstra Polri dan Implementasinya	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : Derenbang Kapolri Dosen II : 1. KBP. Drs. Harry Widiastono 2. KBP. Drs. J. Pieter Silooy
5.	B4505	Kepemimpinan Strategi	24	X	-	-	12	12	-	I	Dosen I : - Wakapolri Dosen II : 1. KBP. Drs. Noer Ali 2. KBP. Drs. M. Alief Saryono
6.	B4506	Peranan Polri Dalam Siskamitas	24	X	-	-	12	12	-	II	Dosen I : Korsaahli Kapolri Dosen II : 1. KBP. Drs. M. Nasser Amir 2. KBP. Drs. Hidiono Adi, SH

LAMPIRAN "B" PERATURAN KAPOLRI
NO.POL : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JUMLAH JP 25 GIATSUS	624								
		JUMLAH JP 5 BS/30 MP	585								
		TOTAL JP	1.209								

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

NAMA PENDIDIKAN : PENDIDIKAN REGULER SESPIM POLRI
NO. KODE GIATSUS : 4000
JUMLAH GIATSUS : 25 GIATSUS / 624 JP
LAMA PENDIDIKAN : 5 BULAN/22 MINGGU EFEKTIF/ 5 BS (30 MP) & 25 GIATSUS / 1209 JP @ 40 MENIT

NOMOR		KEGIATAN KHUSUS	JAMPEL		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
URUT	KODE		PENGAJARAN	EVALUASI			JML	T	P/D	MATERI	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	B4001 s.d. B4024	KEGIATAN KHUSUS									
		TAHAP - I									
1	B4001	Upacara Pembukaan Pendidikan	3	-	Upacara Pembukaan Pendidikan Sespim Polri Dikreg ke-43 T.P. 2006	-	3	-	3	-	-
2	B002	Orientasi Lingkungan	12	-	Mengidentifikasi masalah, pengumpulan data dan analisa masalah serta pemecahannya dan pengambilan langkah-langkah tindakan, mengenal medan dan masyarakat yang ada di lingkungan Sespim Polri, menumbuhkan rasa kebanggaan Pasis Sespim Polri	- Pengenalan lingkungan intern Sespim Polri - Pengenalan lingkungan ekstern/masyarakat sekitar Sespim Polri	12	-	12	-	-
3	B4003	Pembekalan Awal Kasespim Polri	6	-	Untuk membekalkan pengarahan dan petunjuk awal kepada para Pasis sebelum mengikuti proses operasional pembelajaran	-	6	6	-	-	-
4	B004	Orientasi Pendidikan	27	-	Mengenal Struktur organisasi Sespim Polri, memahami tugas, fungsi dan peranan Sespim Polri, mengenal pejabat-pejabat Pimpinan dan Staf Sespim Polri	- Struktur Organisasi - Hubungan Tata Cara Kerja - Tugas, fungsi dan peranan Sespim Polri	27	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	B4005	Survei Penelusuran bakat kepemimpinan (sosiometri)	3	-	Mampu mengambil keputusan dan menilai yang mencerminkan Kepemimpinan, kerja sama dan tanggung jawab	Pemantapan pribadi dalam berorganisasi baik formal maupun informal	3	-	3	-	-
6.	B4006	Behavior Profiling & Mind Management	24	-	Pelatihan kepribadian	- Behavior Profiling - Mind Management	12	-	12	-	-
7.	B4007	Test Kesehatan & Jasmani Tahap Awal	24	-	Tes Kesehatan Jasmani Tahap Awal Pasis Sespim Polri	-	12	-	12	-	-
8.	B4008	Management Course (MC)	60	-	Mengingatkan kembali kemampuan dan keterampilan Pasis yang pernah didapat pada pendidikan sebelumnya tentang Inter Personal Skill, Team Building, Problem Solving dan Manajemen Konflik	- Latihan IPS (Inter Personal Skill) - Experiental learning Cycle - Pre Conditioning Skills - Observing Skill - Discrining Skill - Listening Skill - Questioning Skill - Sumarising Skill - Giving Feed back Skill - Influencing Skill - Task and activities Analsys - Conflict in Perception - Berbicara Efektif dan Menulis Efektif - Comunication & Leadership - Intervention and Negotiation	60	-	60	-	-
10.	B4010	Teknik Penulisan Naskap	9	-	Agar Perwira Siswa mampu melakukan Penulisan Karya ilmiah secara baik	- Pedoman Penulisan karya ilmiah yang baik - Tata Bahasa yang baik dan benar	9	9	-	-	-
11.	B4011	Evaluasi Tahap I	-	36	Mengukur kemampuan/kualitas para Pasis & Mengukur keberhasilan program kurikulum pada Tahap I menyangkut kualitas Kepemimpinan, Akademik dan Kesjas, dengan kompetensi yang ingin dicapai pada Tahap I	- Kemampuan Kepemimpinan - Kemampuan Akademik yang dituangkan dalam Konsep/ Naskah tentang Peranan Kapolres dalam memberdayakan Kesatuan (O.H.A) dan potensi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan ancaman Kamtibmas	36	-	36	Paparan NKP	T/U

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	B4012	Diskusi Tahap I	36	-	Perwira Siswa mampu merumuskan permasalahan dan persoalan, memahami situasi lingkungan organisasi yang berpengaruh pada tugas Polri serta mampu merumuskan pemecahan yang tepat untuk mengatasi permasalahan dengan yang diwujudkan dengan dihasilkan Produk tentang Peranan Kapolres dalam memberdayakan Kesatuan dan Potensi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan ancaman Kamtibmas	Kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan Peranan Kapolres dalam memberdayakan Kesatuan (O.H.A) dan Potensi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan ancaman Kamtibmas	36	-	36	-Paparan NKP & NKS -Sun NKKS, NKK -Paparan NKK	-
		TAHAP - II									
13.	B4013	Pelatihan dari IOM-SCN dalam rangka KKL	36	-			36	36	-		-
14.	B4014	Evaluasi Tahap II	-	36	Mengukur kemampuan/kualitas para Pasis & Mengukur keberhasilan program kurikulum pada Tahap II menyangkut kualitas Kepemimpinan, Akademik dan Kesjas, dengan kompetensi yang ingin dicapai pada Tahap II	- Kemampuan Kepemimpinan - Kemampuan Akademik yang dituangkan dalam Konsep/ Naskah tentang Strategi & Implementasi Pemeliharaan Keamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka mewujudkan Kamdagri	36	-	36	Paparan NKP	T/U
15.	B4015	Penjelasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) - Persiapan - Pelaksanaan	72	-	Menjelaskan pelaksanaan penelitian, tata tertib, koordinasi dan sistem pelaporan	- Sasaran penelitian KKL - Mekanisme pelaksanaan - Wasdal - Pelaporan	72	12	60	-	-
16.	B4016	Diskusi Tahap II	36	-	Perwira Siswa mampu menganalisa profesi kepolisian disesuaikan dengan prediksi ancaman situasi kamtibmas secara komprehensif untuk menyusun konsep Strategi dan Implementasi Penegakan Hukum dalam rangka menunjang menunjang terwujudnya Good Governance and Clean Government	Kemampuan dalam memahami dan mengaplikasikan Profesi Kepolisian yang dituangkan dalam konsep strategi dan implementasi Penegakan Hukum dalam rangka menunjang terwujudnya Good Governance and Clean Government	36	-	36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	B4017	Latihan Olah Taktis : - Persiapan - Pelaksanaan	60	-	- Penjelasan tentang pelaksanaan Latihan Olah Taktis - Pasis mampu menjabarkan produk perencanaan strategis dan operasional tingkat Polda dalam rangka pengendalian situasi di tingkat KOD yang dituangkan dalam Strategi Penanggulangan Trans National Crime sebagai dampak Globalisasi	- Mengaplikasikan seluruh materi yang diperoleh selama proses pembelajaran. - Proses melatih kemampuan akuntabilitas - Implementasi strategis penyelenggaraan tugas pokok di tingkat Polres dan Polwil : - Penyusunan produk perencanaan strategik TK. KOD	60	12	48	-	-
18.	B4013	Seminar : - Persiapan - Pelaksanaan	21	-	- Agar Perwira Siswa memahami tentang Peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Seminar - Agar Perwira Siswa memahami tentang Peran Seminar dengan mengaplikasikan hasil yang didapat untuk menunjang tugasnya	- Pengertian tentang Seminar - Penerapan dalam Pelaksanaan serta mengaplikasikan	21	9	12	-	-
19.	B4019	Test Kesehatan & Jasmani Tahap Akhir	12	-	Tes Kesehatan Jasmani Tahap Akhir Pasis Saspim Polri	-	12	-	12	-	-
20.	B4020	Pembekalan Akhir : - Kapolri - Koor Sahli - Litbang Kompas - Penasehat Presiden	24	-	Untuk memberikan pembekalan potensial dan strategis yang perlu dikembangkan oleh Pasis dalam lingkungan masing-masing	Kebijakan dan arahan Kapolri	24	24	-	-	-
21.	B4021	Naskap - Evaluasi Naskap - Perbaikan Naskap - Evaluasi Naskap Terbaik	12	36	Mengukur kemampuan Pasis sebagai Penulis Naskap Unggulan sebagai hasil Evaluasi Tahap III	Penentuan Naskap	48	12	36	Paparan Naskap	T/LI
22.	B4022	Jam Pimpinan (Kasespim Polri)	6	-	Agar Perwira Siswa mengetahui hasil pendidikan dan agar mampu mengaplikasikan semua materi pelajaran yang diterima selama pendidikan dalam penugasan di lapangan	Kegiatan Pendidikan yang telah dilaksanakan	6	6	-	-	-

LAMPIRAN "C" PERATURAN KAPOLRI
 NO.POL. : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	B4023	Anev Opsdik	3	-	Agar Perwira Siswa mengetahui hasil pendidikan dan agar mampu mengaplikasikan semua materi pelajaran yang diterima selama pendidikan dalam penugasan di lapangan	a. Kegiatan yang telah dilaksanakan b. Hasil Evaluasi	3	3	-	-	-
24.	B4024	Survei Efektif (Sosiometri)	6	-	Mampu mengambil keputusan dan menilai yang mencerminkan Kepemimpinan, kerja sama dan tanggung jawab	Pemantapan pribadi dalam berorganisasi baik formal maupun informal	6	-	6	-	-
25.	B4025	Upacara Penutupan Pendidikan	6	-	Menutup Pendidikan Sespim Polri Reguler ke-44 T.P. 2007		6	-	6	-	-

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



RENCANA POKOK PEMBELAJARAN

NAMA PENDIDIKAN : PENDIDIKAN REGULER SESPIM POLRI
NO. KODE BIDANG STUDI : 4100 - 4500
JUMLAH MATA PELAJARAN: 30 MP / 585 JP
LAMA PENDIDIKAN : 5 BULAN / 22 MINGGU EFEKTIF/ 5 BS (30 MP) & 25 GIATSUS / 1209 JP @ 40 MENIT

NOMOR		BIDANG STUDI / MATA PELAJARAN	JAM FELAJARAN		TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	PEMBAGIAN JP			EVALUASI	
URUT	KODE		PENGA JARAN	EVA- LUASI			JML	T	P/D	MATERI	METODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	B4101 s.d. B4105	<u>BS. KUMDANG</u>									
1.	B4101	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	12	3	Perwira Siswa diharapkan memiliki kemampuan dan komitmen dalam menanggulangi korupsi	a. Kebijakan pemerintah bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. b. Permasalahan-permasalahan di bidang penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. c. Peran Polri dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. d. Kerja sama penanggulangan	15	12	-	3	-
2.	B4102	Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan dan mencegah Illegal Logging	24	-	a. Perwira Siswa memahami peranan hukum dalam penanggulangan Illegal Logging b. Perwira Siswa memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan ilegal Logging c. Perwira Siswa memahami kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Illegal Logging	a. Dasar hukum penanggulangan Illegal Logging b. Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Illegal Logging c. Permasalahan dalam Penanggulangan Illegal Logging d. Kerja sama Polri dengan instansi terkait dalam penanggulangan Illegal Logging	24	12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	B4103	Kebijakan Pemerintah dalam bidang Moneter/Perbankan serta berbagai bentuk Tindak Pidana dalam bidang Moneter/Perbankan	12	3	Perwira Siswa memahami kebijakan pemerintah di bidang moneter dan mengetahui permasalahannya serta mampu menerapkan peraturan/perundang-undangannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Bursa efek dan transaksi Derivatif b. Peranan Bank dalam pertumbuhan perekonomian Nasional c. Kerawanan dan dampak yang timbul di bidang moneter khususnya tindak pidana Money Laundry d. Penegakan hukum di bidang perbankan 	15	12	-	3	-
4.	B4104	Politik Hukum	12	3	<ul style="list-style-type: none"> a. Perwira Siswa memahami politik hukum. b. Perwira Siswa memahami tentang Politik yang mempengaruhi adanya hukum nasional dan perkembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep Politik Hukum b. Pengaruh Politik terhadap perkembangan hukum nasional c. Implementasi politik hukum terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum. 	15	12	-	3	-
5.	B4105	Penegakan Hukum Cyber Crime	12	3	Agar Pasis memahami bentuk, modus operandi, jaringan dan cara penanganan Cyber Crime	<ul style="list-style-type: none"> a. Modus Operandi dan jaringannya. b. Cara penanganannya 	15	12	-	3	-
6.	B4106	Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Hasil Laut	24	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Perwira Siswa memahami Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Hasil Laut b. Perwira Siswa memahami dasar hukum tindak pidana Illegal Fishing mampu mengaplikasikan dalam proses penanganan dan penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk-bentuk dan permasalahan penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing b. Kebijakan pemerintah dan peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing c. Kerja sama Polri dengan instansi terkait Dalam dan Luar Negeri bidang penegakan hukum tindak Illegal Fishing 	24	12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	B4201 s.d. B4206	<u>BS. PENGOSOS</u>									
1.	B4201	Mendesain Survei Kesalan dan Persepsi Masyarakat	24	-			24	12	12	-	-
2.	B4202	Modernisasi Polri dalam rangka menghadapi tantangan global	12	3	Agar Pasis memahami arah Modernisasi Polri selaras dengan perkembangan Iptek Modern	a. Arah Modernisasi Polri b. Perkembangan Iptek Modern c. Prediksi Tantangan Global c. Modernisasi Polri dalam rangka mengantisipasi tantangan global	15	12	-	3	-
3.	B4203	Perkembangan Otonomi Daerah	12	3	a. Penwira Siswa memahami kebijakan pemerintah di bidang Otonomi Daerah b. Penwira Siswa mampu menerapkan aturan Perundang-undangan tentang otonomi Daerah dengan menegakkan hukum Otonomi Daerah	a. UU Otonomi Daerah b. Kerja sama instansi terkait dalam penegakan hukum Otonomi Daerah c. Kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah	15	12	-	3	-
4.	B4204	Polisi Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri	24	-	a. Pasis menghayati hakekat Paradigma Polri. b. Pasis dapat menerapkan Paradigma Polri dalam pelaksanaan tugasnya. c. Menjetaskan tentang format "Polisi Sipil" dalam masyarakat Demokratis.	a. Sejarah Paradigma Polri. b. Hakikat Paradigma Polri. c. Hubungan Paradigma Polri dengan visi dan misi Polri. d. Implementasi Paradigma Polri dalam pelaksanaan tugas. e. Masa depan Polisi Sipil di Indonesia.	24	12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	B4205	Strategi Polmas	12	3	Agar Perwira Siswa di dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dengan metode pemolisian terhadap hubungan komunitas masyarakat	a. Pola hubungan Polisi dan Masyarakat b. Mekanisme mengidentifikasi permasalahan Kamtibmas c. Pemberdayaan potensi masyarakat d. Konsep pemecahan masalah	15	12	-	3	-
6.	B4206	Polri dan Hak Azasi Manusia	12	3	Perwira Siswa memahami dan mampu memberi arahan kepada anak buah tentang perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia dalam pelaksanaan tugas.	a. Konsep Umum HAM b. Ketentuan Internasional tentang perlindungan HAM c. Sanksi terhadap pelanggaran HAM d. Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Polri	15	12	-	3	-
III.	B4301 s.d. B4306	BS. PROFESI									
1.	B4301	Penanggulangan Terorisme di Indonesia	24	-	a. Meningkatkan kemampuan Pasis dalam berolah pikir konseptual dan strategis khususnya yang berkaitan dengan penanganan Terorisme dan Jaringannya. b. Agar Pasis memahami bentuk modus operandi, jaringan, dan cara penanganan Terorisme.	a. Melatih Pasis dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. b. Modus Operandi dan jaringannya. c. Cara penanganannya.	24	12	12	-	-
2.	B4302	Etika Profesi Polri	24	-	a. Perwira Siswa dapat menghayati Kode Etik Profesi Polri dan mampu menerapkan dalam kehidupan pribadi maupun kedinasan. b. Pasis mampu menjadi contoh dan dapat mengarahkan anak buah dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri.	a. Sejarah lahirnya Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Polri. b. Hakekat Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Polri. c. Implementasi Kode Etik Profesi Polri dalam momentum kehidupan pribadi maupun kedinasan.	24	12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	B4303	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	12	3	a. Meningkatkan kemampuan Perwira Siswa dalam berolah pikir konseptual dan strategis khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang b. Agar Perwira Siswa memahami bentuk, modus operandi, jaringan, dan cara penanganannya.	a. Melatih Perwira Siswa dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan b. Modus Operandi dan jaringannya c. Cara penanganannya	15	12	-	3	-
4.	B4304	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	12	3	Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Perwira Siswa dalam berolah pikir konseptual dan strategis khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.	a. Agar Perwira Siswa tertatih dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dan kompleks b. Perwira Siswa mampu menanganinya dari sisi yang berbeda, berpikir dingin rasional, kreatif, kompeten dalam berbagai situasi, dan kondisi yang dihadapi	15	12	3	-	-
5.	B4305	Lingkungan Hidup	12	3	Meningkatkan kemampuan Perwira Siswa dalam berolah pikir konseptual dan strategis khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam penangan lingkungan hidup	a. Melatih Perwira Siswa dalam mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan c. Cara penanganannya	15	12	-	3	-
6.	B4306	Akuntabilitas Publik Pelaksanaan Tugas Pokr	24	-			24	12	12	-	-

IV.	B4401 s.d. B4406	BS. MANAJEMEN									
1.	B4401	Manajemen SDM Polri	24	-	Agar Perwira Siswa menguasai dan terampil mengaplikasikan Fungsi Pembinaan Personel di tingkat KOD	a. Siklus Pembinaan Personel tingkat KOD b. Evaluasi	24	12	12	-	-
2.	B4402	Manajemen Keuangan dan Anggaran Polri	24	-	Agar Perwira Siswa memahami dan mengerti tentang manajemen Keuangan dan Anggaran Polri serta mekanisme pertanggungjawabannya dalam setiap pelaksanaan tugas	a. Pengertian manajemen Keuangan dan Anggaran Polri b. Mekanisme perencanaan Anggaran Polri c. Akuntabilitas Anggaran dalam Operasional Polri	24	12	12	-	-
3.	B4403	Manajemen Operasional Polri	12	3	Agar Perwira Siswa memiliki kemampuan untuk manage kegiatan operasional yang dihadapkan kepada berbagai tantangan tugas di Kesatuannya	a. Pengertian Manajemen Operasional Polri b. Proses tindakan pimpinan dan staf dalam perencanaan operasional d. Sistem Pengendalian Operasional Polri	15	12	-	3	-
4.	B4404	Manajemen Konflik	24	-	Agar Perwira Siswa memahami terjadinya konflik yang disebabkan oleh perubahan serta mampu menerapkan teknik dan taktik mengatasi konflik baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal	a. Pengertian Manajemen Konflik b. Sebab-sebab terjadinya konflik c. Tahap-tahap perkembangan dan anatomi konflik d. Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di ruang adat masyarakat Indonesia e. Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik e. Studi kasus/permasalahan konflik	24	12	12	-	-
5.	B4405	Manajemen Pengawasan	12	3	Perwira Siswa memahami manajemen pengawasan di lingkungan organisasi Polri	a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP di lingkungan Polri b. Penjabaran di di tingkat KOD	15	12	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	B4406	Manajemen Keamanan	24	-			24	12	12	-	-
V.	B4501 s.d. B4506	BS. STRATEGI									
1.	B4501	Perkembangan Lingkungan Strategi	24	-	Agar Perwira Siswa mampu memprediksi segala kompleksitas permasalahan kamtibmas yang timbul sebagai dampak Lingkungan Strategi	a. Gambaran umum proses Globalisasi b. Kecenderungan yang ditimbulkan c. Prediksi ancaman Kamtibmas ke depan d. Konsep pemecahan masalah	24	12	12	-	-
2.	B4502	Metode Prediksi dan Antisipasi	24	-	a. Perwira Siswa diharapkan mampu membuat perkiraan kejadian tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas b. Mampu mengantisipasi kecepatan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat c. Mampu mengantisipasi penyelesaian permasalahan yang timbul	a. Pengertian teori-teori berkaitan dengan prediksi dan antisipasi b. Dinamika perubahan sosial, model-model prediksi dan antisipasi c. Pembuatan keputusan dalam mengantisipasi cara-cara penyelesaian permasalahan yang timbul d. Perencanaan Jangka Panjang di lingkungan Sattama Polri	24	12	12	-	-
3.	B4503	Manajemen Strategi	12	3	Agar Perwira Siswa memahami konsep dan teori manajemen strategi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas	a. Pengertian dan pemahaman tentang Manajemen Strategi b. Implementasi Manajemen Strategi dalam pelaksanaan tugas Polri	15	12	-	3	-

LAMPIRAN 'D' PERATURAN KAPOLRI
 NO.POL : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	B4504	Sistenstra Poli dan Perkembangan organisasi Poli	12	3	Agar Perwira Siswa mengetahui, mengerti, memahami dan mampu mempedomani pelaksanaan tugas dengan sistem yang diletakkan	a. Sistenstra jangka panjang b. Sistenstra jangka sedang c. Sistenstra jangka pendek	15	12	-	3	-
5.	B4505	Keperimpinan Strategis	24	-	Agar Perwira Siswa memahami ciri-ciri keperimpinan masa depan sebagai bekal pengembangan diri di bidang keperimpinan	a. Perkembangan sosial dan budaya memasuki abad ke-21 b. Pengaruh budaya masyarakat terhadap kinerja organisasi c. Ciri-ciri kepemimpinan abad ke-21	24	12	12	-	-
6.	B4506	Peranan Poli Dalam Sskarnas	24	-	Perwira Siswa memahami peranan Poli dalam Sskarnas mampu menjelaskannya di bidang fungsi kepolisian pada organisasi Poli/TK, Kewilayahan	a. Peranan Poli dalam Sskarnas b. Penjabaran di bidang fungsi pada organisasi Poli c. Penjabaran di tingkat kewilayahan.	24	12	12	-	-

/A. B4504

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

